

# PERANAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Disunting Oleh :

**Soedarsono  
Djoko Soekiman  
Retna Astuti**



7

Direktorat  
Kebudayaan

08

---

Diterbitkan Oleh :  
**Proyek Penelitian dan Pengkajian  
Kebudayaan Nusantara (Javanologi)  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
1985**

306 598  
505  
P

# PERANAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT SEJARAH &  
NILAI TRADISIONAL

Disunting Oleh :

**Soedarsono  
Djoko Soekiman  
Retna Astuti**



7

---

Diterbitkan Oleh :  
**Proyek Penelitian dan Pengkajian  
Kebudayaan Nusantara (Javanologi)  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
1985**

PERPUSUSTARAAN  
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Index : 24 C / 1909  
Tanggal terima :  
Tanggal catat : 21 - 8 - 09  
~~Di/haciab dari~~ : Javandora  
Nomor buku :  
Kopi ke :

## KATA PENGANTAR

Buku berjudul *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional* ini merupakan kumpulan empat makalah ceramah yang diselenggarakan oleh Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) setiap hari Senin petang. Drs. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U. dengan makalah berjudul "Kebudayaan Istana Amlapura" mengantarkan kepada para pembaca untuk mengetahui kebudayaan salah satu istana (*puri*) di Bali yaitu istana Karangasem, yang sejak tahun tujuh puluhan diganti nama dengan Amlapura. Dengan sangat terperinci penulis menjelaskan keunikan istana Amlapura, dari denah istana, pembangunan taman-taman, hubungan keluarga istana, sampai ke hubungan keluarga istana dengan masyarakat lingkungannya. Pada abad ke-18 dan ke-19 kerajaan Karangasem merupakan kerajaan terkemuka di Bali, yang sudah barang tentu merupakan pusat kebudayaan daerah yang sangat menonjol pula.

Kebudayaan Kota-Kota di Jawa dipaparkan oleh Dr. Djoko Soerjo dalam makalahnya yang berjudul "Kota-Kota di Jawa pada Abad 17 - 19". Djoko Soerjo pada tulisannya ini menguraikan proses pertumbuhan kota dan urbanisasi di Jawa bagian pantai utara. Dijelaskan pula bahwa proses akulturasi kebudayaan Jawa dan Islam sangat berkembang dan meningkat di Jawa pada periode itu. Selain itu dijelaskan pula bahwa elemen-elemen kebudayaan Eropa mulai masuk ke Jawa pada periode itu pula.

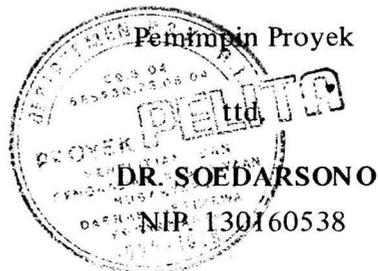
Tentang "Beberapa Aspek Kebudayaan Jawa Dalam Kebudayaan Sunda" diutarakan oleh Dr. Edi S Ekadjati, bahwa semula Sunda (Jawa Barat) dan Jawa tidak terpisah. Lama-kelamaan Sunda dan Jawa makin renggang dan terpisah, baik secara politik maupun kultural. Namun demikian hubungan antara kebudayaan Sunda dengan kebudayaan Jawa banyak terjadi di dalam sejarah, hingga beberapa aspek kebudayaan Jawa nampak di sana-sini dalam kebudayaan Sunda. Bukti-bukti hubungan itu secara cermat diutarakan Ekadjati dengan menunjuk beberapa prasasti dan naskah-naskah Sunda seperti prasasti Cibadak dari tahun 1030 A.D., *Kitab Waruga Jagat*, dan *Cariyos Prabu Siliwangi*. Pengaruh bahasa Jawa terhadap bahasa

Sunda bisa dilihat pada perbendaharaan kata-kata dan stratifikasi bahasa yang di Jawa lazim disebut *undha usuk*.

Edisi buku ini berakhir dengan tulisan Ki Soeratman berjudul "Dengan Membina Kebudayaan Daerah Tamansiswa Memperjuangkan Kebudayaan Nasional". Secara sangat cermat, tokoh Tamansiswa ini menguraikan sejarah berdirinya lembaga pendidikan swasta yang terkenal ini dengan fokus pembeberan perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dijelaskan pula bagaimana konsepsi pembinaan kebudayaan nasional menurut Ki Hadjar, yang kita kenal dengan teori Tri-Konnya, yaitu: Kontinuitas, Konvergensi, dan Konsentritas. Dari uraian Ki Soeratman, jelas bahwa meskipun Ki Hadjar selaku pribadi adalah orang yang benar-benar berasal dari lingkungan Kraton Jawa (Paku-alaman), tetapi jika diamati dari perkembangan pribadinya, ia adalah seorang nasionalis, baik dalam mengutarakan konsepsi-konsepsi pemikirannya, perilakunya, maupun perjuangannya. Maka tidak mengherankan apabila hari lahir Ki Hadjar, yaitu tanggal 2 Mei oleh Pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional.

Kumpulan empat ceramah yang disunting menjadi satu buku berjudul *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Proses Pembentukan Kebudayaan Nasional* ini bermanfaat untuk dibaca oleh bukan hanya peminat-peminat kebudayaan Jawa, Bali dan Sunda, tetapi oleh para pembaca dari ujung utara pulau Sumatera sampai ke perbatasan timur Irian Jaya.

Untuk sumbangan yang sangat berharga ini Pimpinan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada keempat penulis tersebut di atas.



## DAFTAR ISI

PENGANTAR KATA .....	iii
1. Kebudayaan Istana Amlapura Oleh Anak Agung Gde Putra Agung .....	1
2. Kota-kota di Jawa Pada Abad 17 – 19 Oleh Djoko Soerjo .....	23
3. Beberapa Aspek Kebudayaan Jawa Dalam Kebudayaan Sunda Oleh Edi S. Ekadjati .....	39
4. Dengan Membina Kebudayaan Daerah Tamansiswa Memperjuangkan Kebudayaan Nasional Oleh Ki Soeratman .....	61
PARA PENULIS .....	91



**KEBUDAYAAN ISTANA AMLAPURA**

Oleh :

**Anak Agung Gde Putra Agung**



## KEBUDAYAAN ISTANA AMLAPURA

Oleh :  
Anak Agung Gde Putra Agung

### I. PENDAHULUAN

Pertama-tama kami ingin memberikan penjelasan bahwa nama ibu kota Kabupaten Karangasem mengalami perubahan dari Karangasem menjadi Amlapura atas prakarsa bupati Karangasem Anak Agung Gde Karang, pada tahun tujuh puluhan. Perubahan nama ibu kota Karangasem ini menyebabkan pula terjadinya perubahan nama istana Karangasem dari Puri Agung Karangasem menjadi Puri Agung Amlapura.

Pengertian istana atau keraton tempat tinggal raja beserta keluarganya, di Bali dinamakan *puri* (Jawa : pura), sedangkan nama *pura* di Bali adalah sekelompok bangunan suci untuk tempat pemujaan atau tempat persembahyangan. Di Bali sampai sekarang masih kita jumpai beberapa buah *puri* tempat keluarga bangsawan yang dahulu pernah memegang tapuk pemerintahan, baik pada masa kerajaan Bali maupun pada masa kerajaan di bawah kekuasaan Belanda. Puri-puri tersebut antara lain : Puri Mengwi, Puri Pemecutan di Denpasar, Puri Gianyar, Puri Klungkung dan masih ada juga tempat tinggal keluarga bangsawan yang dapat digolongkan *puri* seperti Puri Ubud, Puri Peliatan, hal ini dapat dilihat dari struktur dan polanya.

Berdasarkan atas struktur dan pola ini termasuk juga besar-kecilnya ukuran bangunan, tinggi-rendahnya status sosial, masih ada tempat tinggal golongan Kesatria yaitu golongan Gusti dan golongan Dewa yang disebut *jero*. Pada masa sekarang orang-orang tidak lagi membedakan sebutan *puri* dengan *jero*, karena mereka kurang memperhatikan tentang pola maupun struktur bangunan yang ada. Berbeda halnya dengan tempat tinggal golongan Brahmana atau tempat tinggal pendeta, tempat tinggal mereka dinamakan *geria* yang mempunyai pola tersendiri.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta untuk

berbicara tentang Kebudayaan Istana Amlapura, sebagai "orang dalam" sudah tentu pendekatan maupun interpretasi berdasarkan penglihatan dari dalam, namun bukan berarti semua uraian kami bersifat istana-sentris. Data kami ambil dari beberapa arsip yang masih kami temukan di istana Amlapura dan juga beberapa sumber kami dapatkan di Gdong Kirtya Singaraja, Perpustakaan Istana Mangkunegaran Solo dan di Arsip Nasional Jakarta, di samping itu berdasarkan pengamatan kami secara langsung.

Suatu keunikan yang dapat dilihat pada kebudayaan istana Amlapura bila dibandingkan dengan kebudayaan istana-istana lainnya di Bali adalah bahwa istana Amlapura memiliki beberapa keistimewaan antara lain pada pola atau perdenahan istana, pembuatan taman-taman, hubungan keluarga istana dengan masyarakat lingkungannya terutama dengan masyarakat Islam suku Sasak. Semuanya itu mengingatkan kembali kepada kebesaran kerajaan Karangasem pada abad ke-18 dan ke-19, menjadi kerajaan terkemuka di Bali dan Lombok.<sup>1</sup>

## II. LETAK DAN POLA ISTANA AMLAPURA

### 1. Letak dan pola umum istana di Bali

Untuk memahami letak dan pola istana Amlapura kita dituntut terlebih dahulu pengetahuan tentang letak dan pola umum yang dimiliki oleh istana-istana di Bali. Berbicara masalah letak maupun pola istana, banyak berkaitan dengan masalah-masalah agama, adat-istiadat maupun kepercayaan yang pada umumnya dapat kita katakan berdasarkan kebudayaan Hindu yang berkembang di Bali. Konsep pemikiran orang Bali yaitu *Rwa Bhineda* yang artinya dua hal yang selalu berbeda atau bertentangan, membagi dunia ini menjadi dua *pharatries* yaitu kelaki-lakian (*purusa*) berlawanan dengan kewanita (*perdana*), siang berlawanan dengan malam, dunia atas (*uranisch*) berlawanan dengan dunia bawah (*chotonisch*). Menurut Goris, pembagian atas dua hal yang berbeda ini sudah dikenal sejak zaman purba.<sup>2</sup> Dalam hubungannya dengan arah, yaitu mengikuti konsep *lokapala* yaitu delapan penjuru mata angin, maka utara menunjukkan arah ke gunung berlawanan dengan selatan yang menunjukkan arah ke laut, timur arah tempat matahari terbit berlawanan dengan barat

tempat matahari terbenam. Utara dan timur dianggap sebagai daerah *hulu* sama dengan atas atau uranisch, sedangkan selatan dan barat dianggap daerah *tebēn* sama dengan bawah atau chotonisch.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan konsep kepercayaan yang berkaitan dengan penempatan suatu bangunan yang sesuai dengan arah, sehingga pola perkampungan di Bali pada umumnya berpola *pempatan agung* yang disebut juga *nyatur desa* atau *nyatur muka*. Dua jalan utama yang menyilang desa, arah timur-barat dan utara-selatan membentuk silang perempatan sebagai pusat desa. Perempatan besar atau *pempatan agung* sebagai pusat desa, menjadi kiblat untuk menunjukkan letak suatu bangunan seperti pura Desa, pura Puseh atau *puri* menempati daerah *kajā kangin* (timur laut), *bale banjar* atau *wantilan* yaitu tempat sabungan ayam menempati daerah *kaja kauh* (barat laut), lapangan desa menempati daerah *kelod kangin* (tenggara) dan pasar desa menempati daerah *kelod kauh* (barat daya)<sup>4</sup>. Kuburan terletak pada daerah rendah yaitu daerah di luar desa pada arah selatan atau barat dari pusat desa, sedangkan pura-pura atau kahyangan terletak pada posisi sebaliknya yaitu pada daerah tinggi arah timur atau utara dari pusat desa. Ini mengingatkan kita pada pandangan yang membedakan antara *hulu* dengan *tebēn*.

### 1.1. Pembagian pekarangan atas tiga bagian

Orang Bali percaya bahwa bilangan ganjil 1 sampai 11 dianggap sebagai bilangan yang suci atau sakti. Di antara bilangan ganjil tersebut, bilangan tiga menempati kedudukan yang paling utama. Demikianlah pura maupun puri di Bali pada umumnya mempunyai tiga bagian yaitu *jaba*, *jaba tengah* dan *jero*. Apabila kita lihat pembagian denah pada puri golongan bangsawan pada umumnya yang masih lebih kecil dari pada istana, pekarangan rumahnya dibagi menjadi tiga bagian, pertama : tempat *pamerajan* yaitu tempat pemujaan leluhur, letaknya di *hulu*, timur laut. Kedua: bagian tengah adalah tempat bangunan rumah yang letak masing-masing rumah telah ditentukan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- (a) di sebelah utara: Bale Badung disebut juga Bale Sekutus (rumah bertiang delapan), Gedong, Meten atau Bale Daja (rumah utara), Gedong Gunung Rata, rumah bertiang 16.
- (b) di sebelah timur: Bale Gede, Bale Mudra Manik, Bale Wong kilas

- (rumah bertiang 12) juga disebut Bale Dangin (rumah timur).
- (c) di sebelah selatan: Bale Sekapat (rumah bertiang empat), Bale Sakanem (rumah bertiang enam), Bale Patokan, di sebelahnya terletak dapur dan lumbung. Rumah di sebelah selatan disebut juga Bale Delod.
- (d) di sebelah barat: Bale Tiangsanga (rumah bertiang 9), Bale Sari, Loji disebut juga Bale Bedauh (rumah barat). Bagian ketiga adalah *teba*, tempat pembuangan kotoran.

Pembagian atas tiga bagian tersebut di atas mengikuti filsafat *Tri Hita Karana* yaitu tiga sumber atau jalan untuk mendapatkan kebaikan/kebahagiaan, pertama: *Sang Hyang Jagat Karana* yaitu Tuhan sebagai pencipta seisi dunia ini; kedua: *Bhuwana* yaitu dunia, alam semesta, disebut juga dengan istilah makrokosmos atau *Bhuwana Agung*; ketiga: manusia: adalah mikrokosmos atau *Bhuwana Alit*.

Dalam *Bhuwana Alit* terdapat tiga tingkatan yang disebut *Tri-angga* yaitu *utama angga* adalah kepala, *madya angga* adalah badan, *nista angga* adalah kaki. Demikian pula dalam *Bhuwana Agung* terbagi dalam tiga tingkatan yaitu *Swah loka* adalah alam Dewa, *Bwah loka* adalah alam manusia dan *Bhur loka* adalah alam khewan dan bhuta.

Dalam kehidupan sehari-hari filsafat *Tri Hita Karana* diwujudkan dalam a), *Parahyangan* yaitu tempat-tempat suci dalam wujud bangunan *pura*. tempat pemujaan nenek moyang yang disebut *pamerajan*, *paibon* atau *sanggah*. b). *Palemahan* yaitu tanah yang dapat memberikan hidup manusia seperti sawah, ladang, hutan dan sebagainya. c). *Pawongan* ialah perumahan, tempat manusia bertempat tinggal. Demikian pula pada wilayah desa kita dapatkan pembagian atas tiga bagian yang mengindahkan *hulu-teben*, yaitu karang pura ditempatkan di daerah *hulu* (timur atau utara), karang perumahan berada di tengah-tengah atau pusat desa dan karang setra atau kuburan berada di daerah *teben*, di sebelah barat atau selatan.

Selain dari beberapa macam pembagian yang berpedoman pada arah dan macam bangunan, masih ada lagi pembagian terhadap bangunan rumah yang dibagi atas tiga tingkatan berdasarkan atas tingkatan kasta, status sosial dan peranannya dalam masyarakat, yaitu *utama*, *madya* dan *nista* (sederhana). Tingkatan-tingkatan ini

dapat dilihat dari luasnya pekarangan, tipe bangunan, fungsi dan bahannya. Berdasarkan tingkatan ini, puri atau istana adalah *utama*, geria atau jero adalah *madya* dan dapat pula pada tingkat utama, sedangkan kubu atau pakebon yaitu rumah golongan rendah (*kasta Sudra*) adalah *nista*, yang berarti sederhana.

## 1.2. Pola Puri atau Istana

Puri atau istana menduduki tingkat utama dan pada umumnya terletak atau berada pada daerah *kaja kangin* (timur laut) dari sudut *pempatan agung* (perempatan jalan besar). Pola puri dinamakan "*Sangga Mandala*" yaitu suatu bidang tanah persegi empat panjang (luas istana) berpetak sembilan, mengambil ukuran utama. Diantara daerah satu dengan lainnya atau dari petak satu ke petak lainnya dihubungkan dengan pintu. (Lihat denah).

Fungsi masing-masing daerah (Bali : *karang*) antara lain :

- (1) *Ancak saji* : halaman pertama untuk mempersiapkan diri masuk ke istana. Letaknya di bagian *kelod kauh* (barat-daya).
- (2) *Sumanggen* : tempat untuk melaksanakan upacara kematian yaitu *pitra yadnya*. Letak bangunan di daerah selatan.
- (3) *Rangki* : tempat untuk menerima tamu (*paseban*), persidangan dan pemeriksaan. Letaknya di daerah barat.
- (4) *Pewarangan* : tempat dapur dan perbekalan. Letaknya di bagian tenggara.
- (5) *Lumbung* : untuk tempat menyimpan padi. Letaknya di daerah barat laut.
- (6) *Saren kaja* : untuk tinggal istri raja. Letaknya di daerah utara.
- (7) *Saren kangin* atau disebut juga *saren agung* : untuk tempat tinggal raja. Letaknya di daerah timur.
- (8) *Paseban* : untuk tempat pertemuan atau persidangan kerajaan.
- (9) *Pamerajan Agung* : untuk bangunan suci tempat pemujaan leluhur dari keluarga raja. Letaknya di timur laut.

## 2. Letak dan pola Istana Amlapura

Seperti halnya letak keraton di Jawa, ada pola tertentu yang dapat kita lihat dengan jelas antara lain di depan keraton ada lapangan, letak mesjid, pasar dan sebagainya. Demikian halnya letak puri atau istana di Bali memiliki pola tertentu antara lain letak istana selalu ada di sebelah timur laut perempatan (*pempatan agung*), ada

di sebelah utara pasar, di depan istana ada halaman luas yang dikelilingi tembok yang disebut *bancingah*, di sudut barat daya ada bangunan tinggi dinamakan *bale kulkul*, tempat menggantungkan kentongan.

Demikian halnya letak istana (Puri Agung) Amlapura terletak di sebelah timur laut perempatan besar, di sebelah utara pasar dan memiliki *bancingah* atau disebut pula *ancak-saji*. (Bandingkan denah pola umum dengan denah Puri Agung Amlapura). Istana Amlapura mengalami perluasan sejak mulai masuknya Belanda ke Karangasem sekitar tahun 1900 sehingga memiliki dua *bancingah* yaitu *bancingah tua* dan *bancingah baru*. Didirikannya bangunan-bangunan baru dengan arsitektur yang lebih modern dengan tujuan untuk tempat menerima tamu orang-orang asing terutama pada masa itu adalah pembesar-pembesar Belanda, oleh karena itu gedung tersebut diberi nama Amsterdam yang kemudian berubah menurut lafal orang Bali menjadi Maskerdam yang artinya emas yang gemerlapan. Demikian juga nama kompleks dan nama gedung diberi nama kota yang ada di Jawa dan nama asing seperti nama kompleks Jontail (John Tille ?), Kompleks London, Gedung Yogya, Gedung Betawi, Kompleks Madura. (lihat denah).

Perdenahan istana yang lama, bila kita bandingkan dengan pola istana yang berlaku umum di Bali (berdasarkan pola "Sanga Mandala"), ternyata memiliki pembagian yang lebih besar yaitu 13 bagian. Ini sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwa pola istana Amlapura mengalami perluasan dan menunjukkan tipe bangunan yang baru seperti *Lembu Agung* yang merupakan keunikan pola istana Amlapura, namun sebagian besar masih mengikuti pola umum. Perlu diketahui bahwa nama-nama kompleks dalam pembagian istana, di masing-masing daerah di Bali ada terdapat perbedaan nama, namun fungsinya tetap sama.

Pada bagian istana yang baru, salah satu keunikan yang dimiliki oleh istana Amlapura adalah terdapatnya kolam dan di tengah-tengah kolam terdapat bangunan yang disebut *Gili*. Beberapa peninggalan masa kejayaan kerajaan Karangasem di Lombok juga memperlihatkan keunikan ini seperti yang kita saksikan di Taman Mayura dan Taman Narmada di Cakranagara.

### III. ISTANA SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN

#### 1.1. *Bidang Sastra*

Di Bali sampai sekarang masih banyak kita jumpai lontar-lontar yang tersimpan di rumah-rumah perorangan, terutama tersimpan di geria-geria dan di puri-puri. Di dua tempat tersebut yaitu geria dan puri memang sejak dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui pada masa pemerintahan Dalem Watu Renggong (1480–1550) kerajaan Gelgel mengalami kejayaan terutama di bidang kebudayaan. Pada masa pemerintahannya hidup seorang pujangga besar yaitu Danghyang Nirarta yang banyak berkarya dalam bidang filsafat, *tutur* (tuntunan agama), *sasana* (aturan-aturan), etika, dan kesusasteraan.<sup>6</sup> Kemajuan di bidang sastra ini mengalami kemajuan terus sampai pada masa Klungkung; berpuluh-puluh hasil sastra ditulis selama dua periode tersebut terutama oleh pujangga istana yang kebanyakan terdiri dari golongan Brahmana, yaitu para pendeta istana yang dikenal dengan gelar *Bhagawanta*.<sup>7</sup> Dilihat dari latar belakang sejarah ini maka tidaklah mengherankan bahwa istana menjadi pusat kegiatan kebudayaan, dan hal seperti ini terjadi pula di istana Amlapura sampai permulaan abad ke 20. Memuncaknya bidang sastra di istana Amlapura kemungkinan sekali bersamaan dengan masa kebesaran kekuasaan kerajaan Karangasem pada abad ke-19 yang luas kekuasaannya meliputi Buleleng dan Lombok. Salah satu bukti adalah diketemukannya lontar Negarakertagama di istana Cakranegara oleh tentara Belanda pada waktu istana tersebut dapat direbutnya pada tahun 1894.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan istana Amlapura menjadi pusat kebudayaan, pertama bahwa seorang raja dituntut untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan antara lain ilmu pemerintahan dan hukum menurut konsep ajaran agama Hindu seperti kitab Manawa Dharmaçastra, Adi Gama, Purwa Gama dan sebagainya. Di samping itu masih banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai baik dalam bidang kesusasteraan, agama, etika, filsafat bahkan kitab-kitab weda. Hal ini berhubungan sekali dengan status dan fungsi seorang raja, baik dalam menjalankan kekuasaannya maupun sebagai pengayom masyarakat. Salah satu tugas seorang raja adalah memberikan izin kepada seorang Brahmana (*Welaka*: calon pendeta) untuk

*me-diksa*, yaitu upacara pelantikan menjadi pendeta. Sebelum memberikan izin, raja terlebih dahulu menanyakan tentang *sasaran kapanditan* (syarat-syarat dan peraturan yang harus dipenuhi bagi seorang *welaka* untuk menjadi *pedanda*. Untuk inilah seorang raja perlu mempelajari kitab-kitab weda, bahkan sering juga seorang raja menjalankan *dharma kapandhitan* atau *kawikon*.<sup>8</sup>

Faktor kedua adalah menyangkut kegiatan kebudayaan, baik dalam bidang sastra, seni dan keagamaan. Dalam bidang sastra ada adat kebiasaan pada hari-hari tertentu di istana diadakan *mabebasan*, yaitu membaca lontar kesusastraan atau wiracarita seperti Ramayana, Baratayuda, Sutasoma, Adiparwa dan lain-lainnya; seorang membaca dan seorang lagi yang menterjemahkannya ke dalam bahasa Bali *kepara, lumrah* (baru). Kebiasaan *mabebasan* ini sampai sekarang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Bali, apakah itu dilakukan di balai desa, tempat-tempat pertemuan ataupun pada waktu ada upacara tertentu. Dalam bidang kesenian, ini sama halnya dengan di kraton-kraton Yogyakarta maupun di Surakarta, pada hari-hari tertentu di istana dipakai untuk belajar dalam bidang seni tari, tabuh (karawitan). Hampir semua putra-putra raja dapat menari dan menabuh gamelan, hal ini kemungkinan besar karena faktor lingkungan. Dalam bidang seni kerajinan terutama dalam kerajinan tenun dan anyaman, di istana Amlapura sejak dahulu sampai pada masa Jepang kerajinan tenun dan anyaman ini masih tampak adanya kegiatan. Kerajinan tenun terutama kain *songket* (dengan benang emas), *stagen* (ikat pinggang wanita) biasanya dikerjakan oleh keluarga raja dan para abdi istana (*parekan*) wanita, sedangkan kerajinan anyaman adalah membuat tutup makanan (*saab*) yang dikerjakan oleh para abdi istana yang tinggal di dalam istana dan abdi istana yang tinggal di sekeliling istana (*panjeroan, kawula roban*).

Dalam bidang keagamaan, pada masa kerajaan segala kegiatan upacara keagamaan yang berhubungan dengan masyarakat seperti upacara *Ngusaba Desa* (upacara Adat Desa), upacara *Tabuh Gentuh* atau *Mecaru, Tawur Ke Sanga* yaitu upacara yang dilakukan satu hari sesudah *Nyepi* (tahun baru 1 Çaka) masih di bawah pengawasan istana Amlapura. Demikian pula dalam hal pembangunan pura dan masjid, pihak istana banyak memberikan bantuan material. Hampir semua pura di wilayah kerajaan Karangasem pernah mendapatkan

bantuan dari istana Amlapura baik material maupun beberapa peralatan upacara. Beberapa masjid yang ada di wilayah kerajaan, bahkan sampai di luar wilayah seperti Masjid Jamik di Gelgel, Klungkung materialnya sumbangan raja Karangasem terakhir. Tidak mengherankan kalau beberapa masjid yang ada di wilayah kabupaten Karangasem sekarang masih diketemukan masjid diukir dan dipulas dengan cat emas (cat perada), antara lain masjid di Ujung, masjid di Kecicang, masjid di Subagan, masjid di Saren, Budakeling dan masjid di Sindu.

Dalam bidang seni ukir dan seni patung, pada masa sebelum Kemerdekaan masih ada beberapa orang seniman ukir yang dipelihara di istana Amlapura untuk keperluan bangunan istana dan taman. Istana Amlapura memiliki empat taman yaitu Taman Sekuta (ada dalam kota, sekarang sudah jadi sawah), Taman Stisrengga (3 km dari kota, sekarang sudah jadi sawah), Taman Ujung Sukasada (5 km dari kota) dan Taman Tirta Gangga (6 km dari kota).

#### **IV. KEHIDUPAN ISTANA DAN MASYARAKAT LINGKUNGAN**

Istana sebagai tempat kediaman keluarga bangsawan mempunyai pola kehidupan tersendiri, terikat oleh tata nilai tertentu. Hal ini tampak pada prilaku, tingkatan bahasa dan berbagai macam lambang yang semuanya itu menunjukkan tata kehidupan istana. Dilihat dari sudut pola pembagian tempat tinggal, istana Amlapura mengalami perubahan dari pola lama ke pola baru atau pola istana lama ke pola istana baru sesudah masuknya unsur-unsur pengaruh Barat. (lihat denah). Pada denah istana lama, istri raja ada di belakang tempat tinggal raja, sedangkan bila dilihat dari denah istana yang baru, tempat tinggal istri beserta putra-putrinya mengitari tempat tinggal raja. Gedung Maskerdam (Amsterdam) dan Gili (bangunan di tengah kolam) merupakan pusat, sehingga raja dengan mudah bila memanggil istri atau putra-putrinya. Dalam hubungan suami istri, raja yang datang menginap di tempat kediaman istri raja. Hal ini rupanya agak berlainan dengan kehidupan di istana Yogyakarta dan di istana Surakarta, karena di istana tersebut masih dipisahkan tempat tinggal pria dan wanita (Kaputran dan Kaputren).

Dalam pelaksanaan upacara seperti perkawinan, potong gigi, menginjak dewasa, kematian dan sebagainya, tempat penerimaan tamu dilakukan di bangunan sekitar *Gili*, untuk penerimaan tamu penting disediakan di Gedung Maskerdam. Setelah raja Amlapura terakhir meninggal, Gedung Maskerdam dipakai sebagai "Rumah Adat", artinya setiap ada upacara adat dipakai sebagai tempat menerima tamu resmi.

Berbicara masalah berbagai bentuk upacara, tradisi yang diwariskan turun-temurun sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Beberapa benda pusaka seperti alat upacara, keris pusaka masih tetap dipelihara.

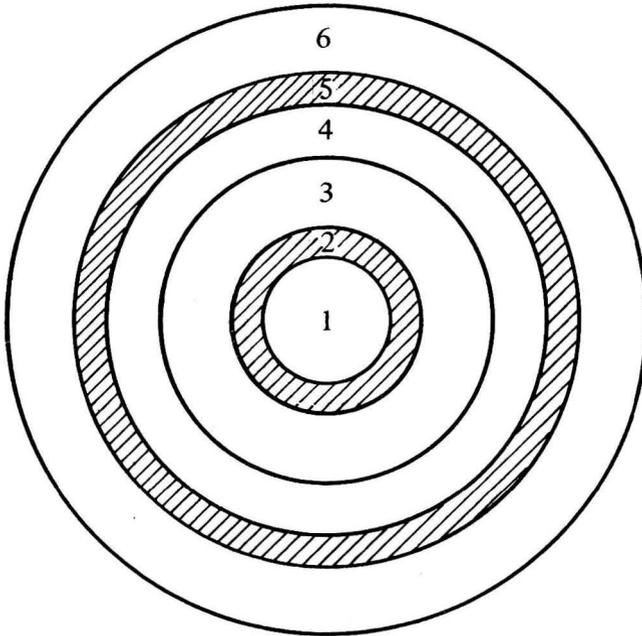
Di dalam istana hanya dihuni oleh keluarga raja yang terdiri dari para istri raja, putra-putri raja, menantu raja, cucu sampai ke cicit. Karena keluarga istana semakin besar, ada juga yang menempati istana Puri Gede yaitu istana yang lebih tua dari istana Amlapura. Di samping keluarga raja, ada juga para abdi istana yang tinggal di istana sebagai penjaga istana dan tukang masak. Sebagian besar dari mereka tinggal di sekitar istana sebagai penjaga istana dan bila tenaganya sewaktu-waktu diperlukan oleh istana dengan mudah memanggilnya. Para abdi istana biasanya dipanggil dengan nama *panjeroan*, *parekan* atau *kawula roban*. Mereka diberi makan dengan sistem *pecatu* yaitu setiap sore hari sekitar jam 17.30 masing-masing keluarga *panjeroan* datang ke *bancingah* untuk mengambil *pecaton*. Nasi beserta lauk-pauk disediakan oleh *sedahan* raja (orang yang mengurus sawah raja) dan setiap bulan *sedahan* harus melaporkan semua pengeluaran *pecaton*.<sup>9</sup>

Beberapa tugas dari *kawula roban* istana adalah :

- (a) *Ngayah* (kerja sukarela) di istana apabila ada upacara.
- (b) Menjadi tukang sapu.
- (c) Sebagai tukang masak raja.
- (d) Sebagai penjaga istana, pada siang hari dan malam hari.
- (e) Sebagai pengiring raja pada waktu bepergian.
- (f) Menjadi utusan raja misalnya membawa surat atau membawa hadiah.

Berbicara masalah hubungan istana dengan masyarakat lingkungan, adalah hal yang cukup menarik karena merupakan salah satu

keunikan yang dimiliki oleh istana Amlapura. Hubungan ini dapat dilihat berdasarkan atas fungsinya seperti terlihat dalam diagram di bawah :



Keterangan :

1. Keluarga Istana = golongan bangsawan.
2. Kawula Roban = abdi istana.
3. Para Dadya = masih ada hubungan keluarga dengan Keluarga Istana.
4. Golongan Brahmana dan Para Pendeta (Pedanda).
5. Golongan Islam (terutama suku Sasak).
6. Rakyat.

Penjelasan no. 1 dan no. 2 sudah diterangkan di atas, sekarang perlu dijelaskan tentang hubungan istana dengan para *dadya* yaitu para Gusti yang ada hubungan keluarga dengan keluarga raja, baik hubungan darah atau melalui perkawinan. Dalam struktur pemerintahan tradisional para Gusti yang ada hubungan keluarga dengan raja diberi jabatan punggawa atau perbekel.<sup>10</sup>

Para dadya ini bertempat tinggal tidak jauh dari istana, kediaman mereka dinamakan *jero*. Oleh karena *jero* ini mengelilingi istana, sehingga nama *jero* itu pun sesuai dengan arah dari letak istana seperti Jero Kelodan ada di sebelah selatan istana, Jero Kawan ada di sebelah barat, Jero Kaler Kauh, Puri Kaleran. Pada waktu istana Amlapura baru selesai dibangun, sedangkan sebelumnya istana raja masih berada di Puri Gede, nama istana Amlapura ialah Puri Kanganin karena tempatnya di sebelah timur Puri Gede. Di sini tampak jelas bahwa istana selalu berada di tengah-tengah, seolah-olah sengaja ditempatkan para dadya itu mengitari puri untuk melindungi istana bila ada kekacauan.

Setiap ada upacara adat di istana, lebih-lebih apabila ada keluarga istana yang meninggal, para dadya berkewajiban datang untuk menerima tamu (bahasa Bali: *ngebengin*), mengatur jalannya upacara, menghias bangunan dan mengawasi orang-orang yang *ngayah* (bekerja dengan sukarela). Dilihat dari status sosial, kedudukan keluarga istana ada di tingkat lebih tinggi dari pada dadya, hal ini tampak dalam berbahasa, berjalan, duduk dan sebagainya (*unggah-ungguh*).

Hubungan keluarga istana dengan para Brahmana khususnya para Pendeta adalah dalam bidang keagamaan dan pendidikan yang ada hubungannya dengan adat-istiadat atau tata sopan-santun yang berlaku di istana. Sudah menjadi keakraban dan menjadi adat kebiasaan di istana Amlapura bahwa putra-putri raja sejak baru lahir diasuh oleh para Brahmana maupun pendeta dari geria Pidada, geria Bungaya (Brahmana Siwa) dan dari geria Budakeling (Brahmana Budha). Dalam hubungannya dengan upacara keagamaan, penyelesaian upacara dilakukan oleh Bhagawanta (pendeta istana). Kedudukan Bhagawanta di samping sebagai penasehat, juga dapat berperan sebagai duta istana, misalnya sebagai juru bicara dalam menyelesaikan soal perkawinan.

Sebelum masuknya pendidikan Barat yaitu pada masa pendidikan tradisional, pendidikan di istana berlaku sistem pendidikan keluarga dimana seorang pendeta atau Brahmana Welaka mengajarkan putra-putranya bagaimana membaca dan menulis di atas daun lontar. Pada tingkat selanjutnya mulai belajar *makakawin* yaitu membaca sambil melagukannya (ada juga menamakan *mawirama*), biasanya pada umur menginjak dewasa.

Apabila umurnya sudah cukup dewasa dan sudah melakukan upacara

menyucikan diri (*mawinten*), baru boleh mengambil pelajaran yang lebih tinggi seperti *usada* (pengobatan), *pawarigan* (perhitungan hari baik) dan *weda*. Di lingkungan istana Amlapura pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi ini biasanya diberikan hanya kepada anak laki-laki, terutama bagi yang akan menggantikannya sebagai raja.

Hubungan istana dengan golongan Islam terutama dengan suku Sasak di kampung Nyuling dan Dangin Sama sudah terjalin sejak adanya hubungan Karangasem dengan Lombok pada abad ke 18.<sup>11</sup> Salah satu sumber yang berangka tahun 1728 Çaka telah menyebutkan penempatan orang-orang Sasak di sekitar desa Bukit yaitu di Kampung Anyar, Kampung Sasak dan di Bukit Tabuan.<sup>12</sup> Suatu hal yang sangat menarik adalah penempatan orang-orang Islam secara berangsur-angsur yang seolah-olah penempatannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga merupakan benteng pertahanan mengelilingi istana. Di bagian sebelah selatan puri (istana) dari pantai Ujung sampai ke kota terletak Kampung Ujung Pesisir, Kampung Ujung Sumbawa, Kampung Ujung Desa, Segara Katon, Dangin Sema. Perkampungan Islam Sasak yang memanjang di sebelah timur dan utara istana terletak Kampung Nyuling, Tiing Jangkrik, Kampung Anyar, Karang Sasak, Tibulaka Sasak, Bukit Tabuan dan Karang Cerme. Di sebelah barat istana terletak Kampung Bangras, Karang Langko, Kampung Tohpati, Ampel, Grembeng, Karang Tebu, Jeruk Manis dan Lumpang Suci. Pada lapisan kedua dari bagian barat pada posisi yang lebih jauh dari istana terletak Kampung Subagan, Karang Sokong, Telaga Mas, Kecicang, Kedokan, Saren Jawa dan Kampung Sindu.

Hubungan orang-orang Islam dengan istana sampai sekarang terjalin baik. Pada waktu ada upacara adat di istana, mereka datang membawa *aturan* (pemberian), juga ada yang membawa kesenian berupa kesenian musik Rebana dari Kampung Nyuling, tari Rudat dan Pencak-Silat dari Subagan dan Kecicang. Ada juga yang datang untuk *ngayah* ke istana (puri), ada yang memang tugasnya menjadi tukang sapu di Pura Bukit, ialah orang-orang Sasak yang tinggal di Tibulaka Sasak dan Bukit Tabuan.

Hubungan istana dengan rakyat terutama sekali dengan rakyat yang berdiam di kota merupakan hubungan yang cukup dekat. Dalam hal-hal tertentu misalnya bila ada kegiatan di istana, melalui organisasi *banjar* mereka diminta untuk membantu istana misalnya mengurus makanan bila ada tamu istana yang jumlahnya cukup

besar. Adakalanya juga dari desa tertentu yang khusus diminta untuk mendirikan bangunan darurat pada waktu ada upacara yang bersifat besar. Ini menunjukkan bahwa keluarga istana Amlapura sampai sekarang masih ada jalinan hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat di lingkungan istana.

## V. PENGARUH KEBUDAYAAN ASING

Dari beberapa bangunan dan corak hiasan yang ada di Istana Amlapura, yang paling tampak adalah pengaruh kebudayaan Tiongkok. Beberapa bangunan tua masih menampakkan corak hiasan Tiongkok dan juga pada ukiran daun pintu Gedong Maskerdam. Kapan bangunan itu dibangun belum ada sumber yang pasti, namun dapat diperkirakan pada pertengahan abad ke 19 pada masa pemerintahan Anak Agung Gde Jelantik (1850 – 1903).

Pada masa pemerintahan Anak Agung Gde Jelantik, ia dapat membangun dua buah rumah yaitu Gedong Tua dengan gaya dan hiasan Tiongkok dan sebuah lagi sesudah masuknya Belanda di Karangasem (1900) yaitu Gedong Maskerdam. Pada waktu itu di Karangasem terdapat 18 orang Tionghoa, di antara mereka ada yang pandai di bidang bangunan dan seorang bernama Yap Sian Liat menjabat sebagai syahbandar di Pasir Putih.<sup>13</sup> Di samping bercorak Tiongkok, ada juga beberapa bangunan maupun hiasan yang bercorak Eropah seperti beberapa pilar dari Gedong Maskerdam yang dikombinasikan dengan corak Bali. Beberapa hiasan seperti lampu dan mebel semua hadiah dari pemerintah Belanda, demikian juga bentuk dan corak hiasan Taman Ujung Sukasada, salah satu taman yang terkenal di Bali, mempunyai corak dan gaya Eropah.

Salah satu keunikan bangunan yang dimiliki oleh istana Amlapura adalah bangunan balai peranganin, ada yang dinamakan *Bale Tegeh* (karena letak bangunannya tinggi) dan ada juga dinamakan *Lembu Agung*, keduanya ini kemungkinan gaya bangunannya diambil dari *Bale Balak* yang berasal dari Lombok.

## VI. KESIMPULAN

Sebagai salah satu kerajaan di Bali yang pernah mengalami kejayaan pada abad XVIII – XIX, masa ini merupakan masa yang penting yang ikut menentukan perkembangan kebudayaan istana Amlapura, sehingga istana berfungsi sebagai pusat kebudayaan terutama di bidang sastra, agama dan kesenian.

Dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing dan kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini, kebudayaan istana Amlapura dalam beberapa segi masih tetap dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang disesuaikan dengan kemajuan jaman. Hubungan istana dengan lingkungannya, terutama dengan orang-orang Islam, merupakan toleransi atau kerukunan beragama yang sudah lama ditanamkan oleh istana Amlapura.

## CATATAN REFERENSI

1. Lihat *E.N.I.* II, hal. 617; W. Cool, *De Lombok Expeditie*. 1896; van Eck, "schetsen van het eiland Bali". *T.N.I.* II, 1878, hal. 338, 340–341.
2. R. Goris, *Bali, Atlas Kebudayaan*. 1954, hal. 34.
3. Lihat uraian Swellengrebel, *Bali, Studies in Life, Thought and Ritual*. 1960, hal. 37–38.
4. *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Proyek IDKD. 1981/1982, hal. 13.
5. Menurut lontar *Hasta Bumi*. Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Unud. no. 765, lb. 9a–10b.
6. Lihat *Babad Dalem* (manuskrip); *Babad Dwijendra Tatwa* (manuskrip); I Gusti Bagus Sugriwa, *Pamargan Danghyang Nirarta di Bali*. Denpasar: 1975, hal. 49, cf. Parisada Hindu Dharma, *Upadeça*, 1970, hal. 29.
7. Hasil karya sastra pada zaman Gelgel dan zaman Klungkung, lihat *Babad Dalem* (manuskrip); *Babad Blahbatuh* (manuskrip), *Kidung Pamancangah*, diterjemahkan oleh Gora Sirikan, Denpasar: 1957, hal. 1.
8. Sebagai contoh adalah raja Karangasem terakhir Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem (wafat 1966) menjalankan *kawikon*, juga salah seorang anaknya perempuan juga melakukan dharma kepanditan. Dari sejarah keluarga raja Karangasem, baik yang ada di Bali maupun yang ada di Lombok, banyak yang menjalankan kawikon. Lihat *Pamancangah Anak Agung ring Panegara Karangasem*. (naskah).
9. Arsip Istana Amlapura.
10. Nama-nama punggawa di Kerajaan Karangasem hampir semuanya dijabat oleh para Gusti. Lihat Arsip Istana Karangasem, th. 1937.
11. Tentang hubungan Karangasem – Lombok, lihat E. Utrecht,

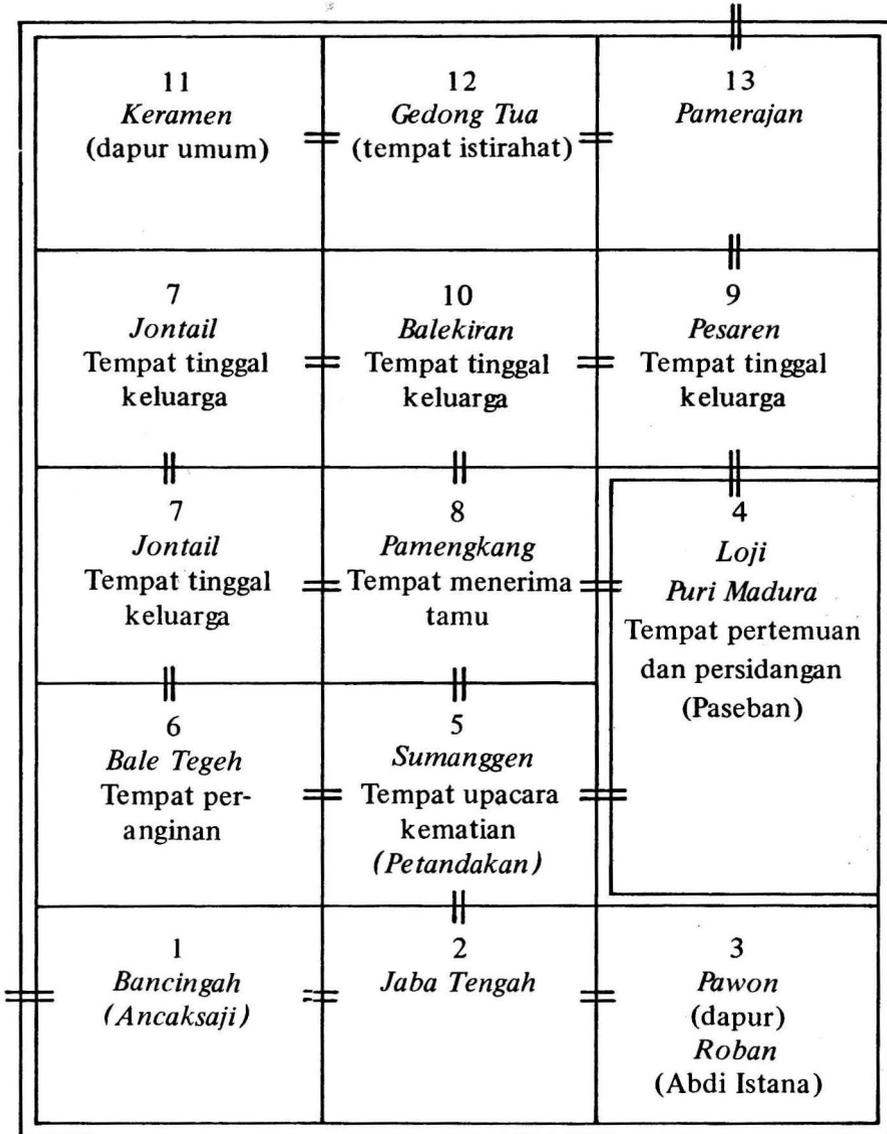
*Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, 1962, hal. 99–101.

12. *Surat Piteket*, I Gusti Bagus Banjar kepada I Pasek Bukit pada masa pemerintahan I Gusti Anglurah Made Karangasem Sakti, ditulis pada tahun 1728 Caka (1806 M).
13. Lihat *Rapport van eene reis van Controleur voor de politieke aan gelegenheden vergezeld door den Poenggawa van Soekasada Goesti Njoman Raka van 27 Djanuari – 7 Februari 1900*. Batavia : Albrecht & Co, 191, hal. 3–4.

**POLA PURI (ISTANA): "SANGA MANDALA"**

7 Lambung	8 Tempat Istri Raja	9 <i>Pamerajan Agung</i>
6 <i>Rangki</i> (Tempat penghadapan)	5 <i>Paseban</i> Tempat perundingan atau persidangan	4 Tempat tinggal Raja
1 <i>Ancaksaji</i>	2 <i>Sumanggen</i>	3 <i>Pawarangan</i> (dapur)

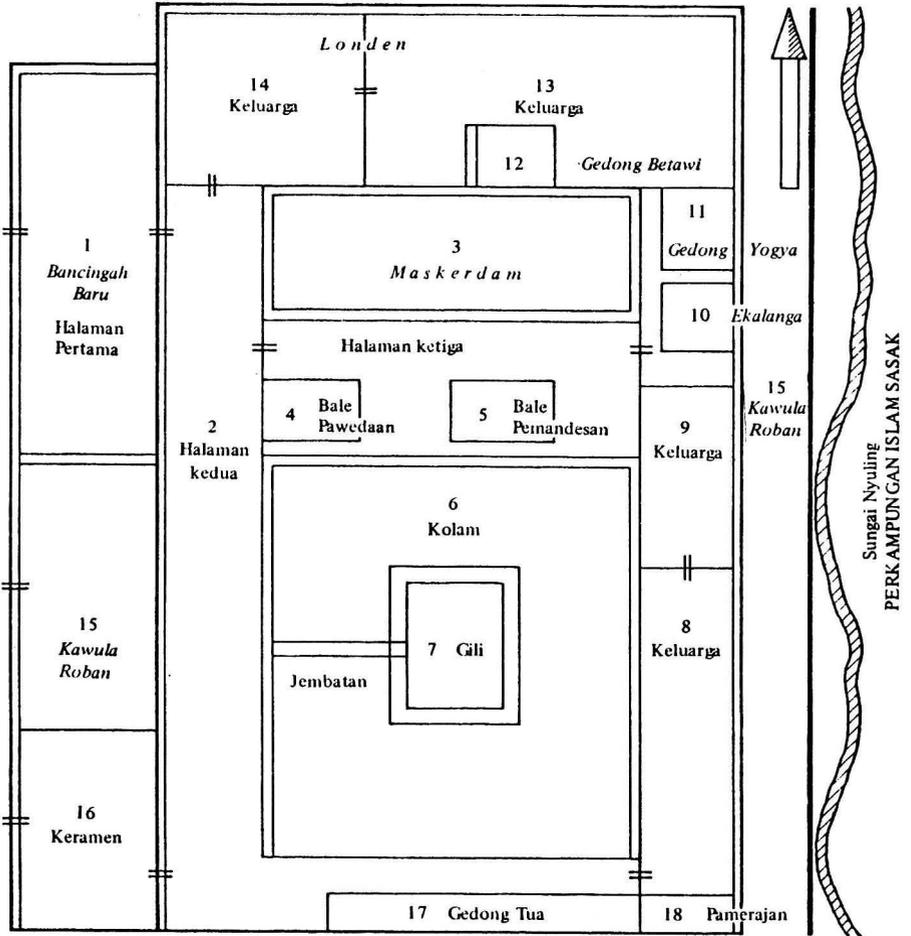
**BAGAN DENAH ISTANA AMLAPURA  
(BANGUNAN TRADISIONAL)**



DENAH ISTANA AMLAPURA (KOMPLEKS ISTANA BARU) -- tanpa skala

15

Kawula Roban (Abdi Istana)



Kompleks Istana Lama

**KOTA-KOTA DI JAWA PADA ABAD 17 – 19**

Oleh :  
**Djoko Surjo**



## KOTA—KOTA DI JAWA PADA ABAD 17 – 19

Oleh :  
Djoko Surjo

### I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota dan urbanisasi dewasa ini sering dianggap sebagai indikator kemajuan dan modernisasi.<sup>1</sup>

Proses pertumbuhan kota dan urbanisasi itu di Indonesia sering diikuti dengan timbulnya persoalan-persoalan sosial dan budaya yang dalam beberapa hal dapat menghambat jalannya pembangunan. Untuk dapat memahami persoalan-persoalan itu maka peruntutan sejarah pertumbuhan kota-kota di Indonesia diperlukan. Tulisan ini dimaksudkan bukan untuk menguraikan sejarah pertumbuhan kota-kota di Indonesia secara menyeluruh, melainkan lebih ditujukan untuk memberikan gambaran singkat tentang pertumbuhan kota-kota di Jawa, terutama pada sekitar abad 17 – 19. Diharapkan dengan merunut sejarah pertumbuhan kota-kota di Jawa pada periode itu tidak saja akan dipahami ciri umum yang berlaku di Indonesia maupun di Asia Tenggara pada umumnya, tetapi apabila mungkin ingin diketahui pula ciri khususnya yang terdapat di Jawa. Keduanya mungkin dapat dijumpai dalam segi fisik maupun non-fisiknya yang dipengaruhi oleh ekologi dan lingkungan sosio-kultural kota setempat. Dua segi yang terakhir ini akan lebih mendapat tekanan dalam tulisan ini. Sengaja uraian ini dibatasi pada periode abad 17 – 19, agar dapat dipahami unsur-unsur pokok yang membedakan dengan perkembangan kota dewasa ini.

Pada dasarnya kota memiliki ciri universal yang berhubungan dengan asal pertumbuhan, lokasi, ekologi dan unsur sosialnya baik yang terdapat di Timur Tengah, India, Asia Tenggara dan Cina,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East* (New York: The Press, 1958), hlm. 61.

<sup>2</sup>Lihat contoh-contoh kota di beberapa daerah Asia dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial* (Jakarta: Bhra-tara Karya, 1977).

bahkan juga di Eropa. Faktor-faktor ekonomi, politik, teknologi dan sosial sering dianggap mendasari tumbuhnya suatu kota. Berbagai definisi kota sering mencakup unsur-unsur seperti keluasan, kepadatan, heterogenitas (kegandaan) sosial, pasar, fungsi administratif, sumber kehidupan (bukan semata-mata penghasil pangan), dan unsur budaya yang membedakan dengan kelompok sosial yang ada di luarnya.<sup>3</sup>

Keluasan, menurut Louis Wirth, mendasari hilangnya (mengendornya) hubungan pribadi dan penggantian media komunikasi tatap muka, keanekaragaman, dan spesialisasi.<sup>4</sup> Hilangnya hubungan primer memerosotkan kekerabatan, dan ikatan keluarga, diikuti runtuhnya kerangka sosial lama dengan tumbuhnya kerangka sosial yang baru. Ekologi kota mencakup hubungan antara penduduk dan lingkungan yang mendasari terbentuknya unsur budaya yang membedakan dengan kelompok yang ada di luarnya, serta mendasari tata ruang dan pembagian pekerjaan lapisan sosial yang ada di dalamnya. Sesuai dengan fungsi dan penggolongan sosial yang terdapat di dalam pelapisan sosialnya, kota sering dibedakan atas beberapa tipe, seperti tipe kota pasar/dagang,<sup>5</sup> kota beteng, kota "suci"/agama, dan kota istana/pemerintahan. Mengenai lokasinya kota dapat terletak di pantai, pedalaman, di bukit atau di lembah sungai dan muara sungai. Tempat-tempat ini sering semula merupakan pusat persilangan jalan lalu-lintas perdagangan atau angkutan, yang memungkinkan tumbuhnya tempat pemberhentian, pasar, pemukiman dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kota-kota kuna di Indonesia atau Jawa pada umumnya mengenal sebagian dari ciri-ciri yang tersebut di atas.

## II. KOTA-KOTA KUNA DI JAWA DAN DI INDONESIA

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, kota-kota

---

<sup>3</sup>Emrys Jones, *Towns and Cities* (London, New York: Oxford University Press, 1966), hlm. 1-8.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>5</sup>Max Weber memberikan ciri pokok kota sebagai pusat pasar, dan membedakannya atas tiga tipe, yaitu kota konsumen, kota produsen dan kota pedagang. Lihat Max Weber, *Economy and Society*, (disunting oleh Guenther Roth dan Claus Wittich), Jilid 2 (Berkeley, Los Angeles, London: University of California, 1968), hlm. 1212-1217.

kuna yang tumbuh di Jawa dan daerah lain di Indonesia pada umumnya mengenal tipologi kota istana dan kota pasar/dagang termasuk juga kota "suci". Tipe ini malahan umum terdapat di kawasan Asia Tenggara. McGee, diantaranya menyatakan bahwa kota-kota di kawasan Asia Tenggara pada fase urbanisasi awal, yaitu sebelum perkenalannya dengan pengaruh Barat, pada umumnya terpusat pada dua tipe kota, yaitu "kota Dewa" atau "kota suci" (*sacred city*) dan "kota pasar" (*market cities*).<sup>6</sup> Kota yang pertama dibentuk atas landasan konsep "dewa raja" yang berakar pada tradisi besar kebudayaan Hindu. Konsep ini telah menjadikan pemuka-pemuka pribumi menempatkan diri pada kedudukan sebagai penjelmaan dewa, dan memberikan pengukuhan kosmologis bagi kekuasaannya dengan menciptakan pelapisan sosial beserta lambang-lambang status yang berhubungan dengan fungsinya sebagai raja dan dewa, seperti istana, singgasana, payung, dan alat-alat upacara, yang semuanya ada di dalam bangunan tembok "kota" yang "suci".<sup>7</sup> Pada "kota agama" kemakmuran diperoleh dari penerimaan surplus pertanian dan tenaga kerja dari pedesaan yang ada di bawah naungannya. Menurut McGee, kota yang kedua yaitu "kota pasar", pada dasarnya merupakan pecahan dari kota yang pertama setelah terjadi pemisahan fungsi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomis setelah perkembangan politik, ekonomi dan teknologi terjadi pada abad-abad kemudian.<sup>8</sup> Kemakmuran "kota pasar" diperoleh dari sumber kegiatan perdagangan di pelabuhan sebagai pusat perdagangan, dengan penggunaan kekuasaan maritim sebagai pemegang kekuasaan kota itu untuk menguasai perdagangan atau membuka pedagang asing untuk berdagang di kotanya sebagai pusat perdagangan. Surplus pertanian inilah yang memungkinkan kota itu menjadi pusat konsumen, pusat akumulasi kemakmuran dan tradisi, serta menjadi pusat pengembangan pola-pola kebudayaan atau pusat peradaban. Di daratan Asia Tenggara keduanya dapat diwakili oleh Angkor Thom sebagai "kota Dewa" dan Malaka sebagai kota pedang.

Di Jawa tipe itu mungkin dapat dikenakan pada kota-kota

---

<sup>6</sup>T. G. McGee, *The Southeast Asian City, A Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia* (London: G. Bell and Sons, Ltd., 1968), hlm. 29-33.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm., 30.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 36-37.

kuna yang ada di bawah pengaruh tradisi besar Hindu seperti pada ibukota kerajaan Majapahit, dan ibukota kerajaan Sriwijaya di Sumatra. Konsep kota sebagai pusat perantara dunia bawah dan atas dalam kosmologi Hindu kiranya mendasari pembentukan tata kota, pembagian wilayah dan struktur sosial yang secara konsentris terpusat pada istana. Puncak perkembangan Majapahit sempat menciptakan unsur budaya keraton yang mempengaruhi kota-kota istana yang tumbuh pada periode kemudian.

Dalam tradisi kebudayaan yang tumbuh pada masa berikutnya yaitu tradisi besar Islam, kota Demak dan Banten mungkin lebih mirip dengan pengertian "kota pasar" di muka, sekalipun fungsinya sebagai "kota agama" menonjol. Kedua fungsi itu tercermin juga pada kota-kota seperti Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya yang mencapai perkembangannya pada abad ke-17.

Kota-kota di atas sekaligus mewakili jenis kota pedalaman dan kota pantai atau pesisir yang dalam perkembangan politik dan ekonomi menimbulkan konflik dan ketegangan-ketegangan. Pertentangan kedua lingkungan itu diikuti dengan pergeseran pusat-pusat kekuasaan politik dari daerah pesisir (Demak) ke daerah pedalaman, yaitu Pajang dan Mataram, yang berpusat pada kota istana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan kota-kota di daerah pedalaman dan pesisir menciptakan dua lingkungan budaya, yaitu budaya istana yang berpusat pada kota istana dan budaya pesisir yang berpusat pada kota-kota dagang.

### III. DARI KOTA DAGANG KE KOTA KOLONIAL

#### 1. Kota Dagang di Pesisir Jawa

Kiranya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa orang Jawa telah lama terlibat dalam dunia pelayaran dan perdagangan. J.C. van Leur dan B. Schrieke, misalnya, banyak mengungkapkan tentang peran pedagang Jawa dalam lalu-lintas perdagangan di kepulauan Indonesia dan di Asia Tenggara, terutama pada abad ke-16.<sup>9</sup> Secara

---

<sup>9</sup>Baca J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society. Essay in Asian social and economic history* (The Hague/Bandung: W. Van Hoeve, Ltd., 1955), dan B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Selected Writing, Part One (Bandung: "Sumur Bandung" & Van Hoeve, 1960).

singkat dapat dikatakan bahwa setelah perdagangan internasional di Asia Tenggara berpusat di Malaka, maka tumbuhlah pusat-pusat perdagangan di pantai Jawa bagian timur sebagai penimbun rempah-rempah dari Maluku, yang sampai di Malaka melalui pedagang dari kota pelabuhan itu. Dari Malaka bahan perdagangan yang sangat menguntungkan itu sampai di Eropa melalui jalur Cambay, Aden dan Alexandria.<sup>10</sup>

Kota-kota dagang yang tumbuh di pantai Jawa ini sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu ekonomis dan agama. Di kota-kota ini pula bertumpu basis kekuatan maritim Jawa. Kota perdagangan yang utama di sini ialah Tuban, Gresik dan Jepara, sedangkan Sedayu, Lasem, dan Surabaya menduduki tempat kemudian.<sup>11</sup> Peran kota-kota di pantai utara Jawa bagian timur yang tumbuh berkembang menjadi kota-kota pelabuhan sebagai kesatuan mata rantai di sekitar selat Madura secara mendalam telah dikaji oleh F.A. Sutjipto.<sup>12</sup> Kota-kota yang dimaksud ialah Gresik, Surabaya, Pasuruan, Prabalingga, Besuki, Penarukan, Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan.

Kota Tuban telah tumbuh pada abad ke-14 sebagai bandar pelabuhan Majapahit, dan pada abad ke-15 berkembang menjadi pemegang monopoli perdagangan Jawa. Surabaya dan Gresik telah tumbuh pada periode yang sama, dan disebutkan bahwa pada sekitar tahun 1430 ketiga kota itu seluruhnya dihuni oleh sekitar seribu keluarga.<sup>13</sup> Khusus di kota Gresik pada tahun 1523 telah berdiam tiga ribu penduduk yang telah memeluk agama Islam yang sebelumnya beragama Hindu,<sup>14</sup> suatu jumlah yang cukup besar untuk ukuran kota pada waktu itu. Kota berikutnya yaitu Surabaya dan Jepara, menurut catatan orang Belanda pada abad 17 memiliki penduduk berturut-turut enam puluh ribu dan seratus ribu,<sup>15</sup> menggambarkan kota bandar yang besar pada jamannya. Selain jumlah penduduknya,

---

<sup>10</sup> B. Schrieke, hlm. 24.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat F.A. Sutjipto *Tjiptoatmodjo, "Kota-kota Pantai di sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai medio abad XIX)"*, Disertasi Doktor, U.G.M., Yogyakarta, 1983.

<sup>13</sup> B. Schrieke, hlm. 25.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

suasana kota dan struktur penduduk kota dengan diferensiasi sosialnya banyak dideskripsikan pula oleh pengunjung yang datang dari Barat. Seperti dikatakan bahwa di kota Tuban banyak tinggal para bangsawan yang banyak menangani jual beli barang dagangan sutra, mori dan pakaian. Mereka memiliki perahu-perahu untuk memuat rempah-rempah yang diperoleh dari jual beli bahan perdagangan itu di Banda, Ternate, dan bahkan sampai di Pilipina. Berbeda dengan para bangsawannya, penduduk pada lapisan bawah banyak yang melakukan kegiatan dalam penangkapan ikan dan beternak.<sup>16</sup> Demikian pula kota Jepara, Gresik dan Surabaya digambarkan sebagai kota yang banyak dikunjungi oleh ribuan perahu yang berbobot 20, 50 sampai 200 ton. Pada musim timur armada perahu perdagangan bergerak menuju ke Selat Malaka, Palembang, Kalimantan, Patani Siam, dan kota-kota lainnya. Pada musim barat mereka kembali pergi menuju ke Bali, Banten, Bima, Solor, Timor, Alor, Salayar, Buton, Buru, Banggai, Mindanau, Maluku Ambon dan Banda, dan pulau lainnya.<sup>17</sup>

Suasana kota-kota pantai di atas pada umumnya lebih bersifat kosmopolitan dibanding dengan kota-kota di pedalaman. Pedagang asing dan pengrajin mewakili sebagian besar penduduk kota, dan mereka tinggal mengelompok di bawah kepala masing-masing menurut asal kebangsaannya.<sup>18</sup> Sekalipun kehidupan kota dipengaruhi oleh sejumlah hubungan dengan luar negeri, namun suasana kota tidak menunjukkan sifat borjuis.<sup>19</sup>

Sifat pemerintahannya masih mirip seperti yang berlaku di daerah pedalaman, yaitu bersifat feodal dan tradisional.

Patut dicatat bahwa kota-kota Demak, Gresik, Cirebon, Banten selain menduduki kota pelabuhan juga menduduki sebagai pusat tradisi besar Islam. Pada masa kerajaan Demak tumbuh mata rantai pusat-pusat perguruan Islam yang dipimpin oleh para mubalig Islam yang lebih dikenal sebagai *wali* yang bermukim di Gresik, Demak dan sekitarnya, Cirebon dan tempat lain yang sebagian menjadi penasehat

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>18</sup>W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change* (The Hague, Bandung: W. van Hoeve, 1956), hlm. 168.

<sup>19</sup>*Ibid.*

raja-raja Demak. Dari tempat itu Islamisasi berjalan ke berbagai tempat baik ke pedalaman Jawa sendiri maupun ke berbagai daerah luar Jawa.<sup>20</sup> Gresik sering disebut-sebut sebagai pusat pendidikan Islam bagi daerah luar Jawa terutama di daerah Maluku. Di kota ini banyak datang santri dari Maluku, demikian pula orang Jawa Muslim yang pergi ke daerah tersebut.<sup>21</sup> Dari masa itu pula proses akulturasi kebudayaan Jawa dan Islam meningkat dan berkembang terus pada periode berikutnya sampai di pusat kota istana di pedalaman, yaitu ibu kota kerajaan Mataram dari Kota Gede, Plered, Kartasura, sampai kemudian Surakarta dan Yogyakarta. Dalam proses itu pula kebudayaan Jawa makin diperkaya dengan unsur-unsur baru yang dari tradisi besar Islam. Peran wali dan kemudian Kyai menempati peranan penting dalam menciptakan apa yang kemudian disebut Geertz "peradaban santri" di Jawa.<sup>22</sup>

Kota-kota dagang Jawa di atas mencapai puncaknya sebagian hanya sampai pada sekitar abad ke-17, dan pada abad berikutnya mengalami kemunduran, setelah timbul perimbangan baru sebagai akibat masuknya pengaruh kekuasaan Barat, dimulai dengan kehadiran V.O.C. pada abad 17 sampai dengan kekuasaan pemerintahan kolonial oleh penggantinya Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Dengan demikian semenjak itu pedagang-pedagang Jawa setapak demi setapak mengundurkan diri dari kegiatan perdagangan internasional dan nasional terutama dalam perdagangan lautnya. Kegiatan di sektor perdagangan dan pelayaran bergeser ke sektor pertanian, yang dapat dianggap sebagai indikator kemunduran.

## 2. Tumbuhnya Kota Kolonial

Pada awal kehadirannya bangsa Eropa di Asia Tenggara dan Indonesia ditandai dengan usaha untuk membangun jaringan kota yang ditujukan untuk menguasai perdagangan di daerah yang ada

---

<sup>20</sup> Mengenai proses Islamisasi di Jawa dapat dibaca dalam karya H.J. de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, *De eerste Moslimse Vorstendommen op Java, Studien over de Staatkundige Geschiedenis van de 15de en 16de eeuw*, VKI Vol. 69, Th. 1974.

<sup>21</sup> B. Schrieke, *op. cit.*, hal. 33-34.

<sup>22</sup> Hal yang berhubungan dengan segi ini dapat dibaca dalam C. Geertz, *The Religion of Java* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976).

di bawah pengaruhnya. Keadaan cepat berubah pada abad ke-19. Kebutuhan pasar dan bahan mentah bagi industri yang sedang tumbuh cepat di Eropa Barat menyebabkan timbulnya kebutuhan akan pelabuhan dan jaringan komunikasi yang menghubungkan pelabuhan dan daerah pedalaman yang menghasilkan produksi tropis dan mineral. Jaringan administrasi di lain pihak juga diperlukan untuk melancarkan pengawasan politik kepada penduduk pribumi. Pembukaan perkebunan, dan pertambangan dengan modal-modal swasta mempercepat timbulnya kota-kota baru bagi kepentingan penimbunan dan pengangkutan produksi usaha yang dibukanya, dan juga pasaran di daerah tanah jajahan. Dengan demikian kota baru ini muncul sebagai pelabuhan ekspor produksi tropis dan pasaran industri serta sekaligus juga pusat pemerintahan kolonial.

Di Indonesia, dapat ditunjukkan dengan munculnya kota-kota Batavia yang dibangun oleh VOC, kemudian menyusul Semarang dan Surabaya yang semuanya dijadikan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan administrasi pemerintahan, telah menggeser kedudukan kota-kota yang sebelumnya telah ada. Dengan perluasan kekuasaan VOC atas daerah-daerah pesisir Jawa, maka VOC berhasil mengambil alih hak monopoli perdagangan yang ada di kota-kota pelabuhan sebelumnya, dan mengalihkan kegiatan perdagangannya di kota yang dibangunnya. Tidak mengherankan pada abad 18 pelabuhan Banten, Jepara, dan Tuban praktis mundur untuk kemudian tidak berfungsi. Muncullah kota penggantinya yaitu Batavia, Semarang dan kemudian Surabaya. Di kota-kota itu segera tumbuh menjadi pusat permukiman baru bagi penduduk kota yang suasananya berbeda dengan sebelumnya. Bangunan kota dengan tata ruang permukimannya dan penggolongan dan pengelompokan sosialnya sesuai dengan pelapisan sosial yang disusunya, segera tercipta sebagai ciri baru sebagai kota yang bercorak kolonial.

Kota Batavia yang dibangun pada abad 17, oleh pendirinya J.P. Coen, diinginkan sebagai duplikat kota lama di negeri asalnya, dan sebagai tempat bermukim yang nyaman bagi warga Belanda. Untuk itu pula gaya borjuis dan kebudayaan Holland segera diimport. Namun demikian, kota ini tumbuh dan berkembang tidak sepenuhnya sesuai dengan idealnya. Kota ini berkembang menjadi semacam kota Timur yang menampilkan sebagai hasil akulturasi antara Barat

dan daerah setempat. Gaya borjuis yang diinginkan tidak sepenuhnya hidup, tetapi sebaliknya adaptasi terhadap gaya hidup kaum elite pribumi Jawa terjadi. Sekalipun demikian tata kota tetap dibangun sesuai dengan rencana yang dikehendaki. Seperti pusat pemerintahan ada di beteng dengan Gubernur Jendral sebagai penguasanya, administrasi pemerintahan bukan bersifat demokratis tetapi autokratik. Pegawai-pegawai Kumpeni sekaligus merangkap fungsi sebagai pedagang, tetapi gaya kehidupan mereka dekat dengan gaya kehidupan bangsawan Jawa. Demikian pula cara hidup klas kerani, *Mixtiezen* (Mestizos), dan *Mardijkers* (keturunan budak-budak yang beragama Kristen yang kebanyakan diimpor dari pantai India), kebanyakan bergaya Timur dalam segala tata cara kehidupan kekristenannya.<sup>23</sup>

Daendels, tidak menyukai keadaan kota Batavia, yang dianggap jorok dan pengap. Ia membangun tempat baru yang lebih dianggap sehat dan cukup segar sebagai tempat kediamannya, dengan bangunan villa, cukup ruang, segar dan dikelilingi oleh petamanan yang luas, tetapi gayanya mirip dengan tata ruang bangunan *priyayi* Jawa. Demikian juga denah kota pada umumnya juga menggambarkan pengaruh denah kota Indonesia lama (bernama Weltevreden). Alun-alun dibangun di muka tempat kediaman dengan dilengkapi jalan-jalan di luarnya, dan dibalik jauh dari pusat kediaman ini terdapat pohon dan semak yang meribunnya kampung.

Kota Weltevreden seperti tersebut di atas merupakan kota yang masih mencerminkan lingkungan pedesaan. Tidak hanya corak bangunan fisik kota yang berubah dalam bentuk tersebut, tetapi juga suasana kota yang tidak secara khas menampilkan sifat ke-Eropaan ataupun ke-Indonesiaan. Orang menyebutnya corak "Indisch", yaitu istilah yang sering dipakai untuk menyebut "Indo" bagi mereka yang dilahirkan dari percampuran darah antara orang Eropa dengan orang pribumi. Dengan demikian kata "Indisch" dipakai untuk menyebut gejala kebudayaan campuran dari element-element Eropa dan Indonesia.

Pembukaan Jawa atas penanaman modal swasta Barat sejak tahun 1870, memiliki arti bagi perkembangan perkotaan di Jawa. Sejak itu bukan saja perdagangan meningkat, melainkan juga perindustrian ikut naik, yang semuanya menjadi faktor penarik bagi

<sup>23</sup>W. F. Wertheim, *op. cit.*, hlm. 170.

terjadinya arus urbanisasi. Akibatnya kota-kota berkembang dan meluas, dan penghuni kota menjadi lebih dinamis. Kota-kota tumbuh di sepanjang jalan-jalan raya, terutama di jalur yang menuju ke kota lain, diikuti dengan bangunan perumahan dengan segala bentuk. Orang-orang kaya menyukai tinggal di tepi jalan raya, diikuti oleh munculnya toko-toko Cina dan warung-warung pribumi, dan tidak ketinggalan rumah-rumah penduduk pribumi yang mengambil ruangan lebih luas dibalik dari jalan raya ini, membentuk perkampungan yang bersuasana pedesaan. Dengan demikian kota baru lahir, tetapi juga bercorak pedesaan. Umumnya kampung-kampung orang pribumi, baik orang Jawa dan orang dari suku lain hidup dalam keadaan yang jelek. Perumahan, sanitasi, jalan-jalan semuanya dalam keadaan buruk. Berbeda sekali dengan pihak orang Eropa, orang Cina dan pemuka orang pribumi. Timbullah masalah sosial, seperti kemiskinan, kejahatan, pelacuran, dan pekerjaan, karena makin banyaknya arus urbanisasi dari desa ke kota.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam kota kolonial ini terdapat perbedaan status yang didasarkan diskriminasi rasegregasi etnis dan munculnya "budaya kota" baru yang merupakan campuran dua elemen Barat dan pribumi. Ciri membengkaknya kota menjadi kota besar merupakan ciri kota kolonial yang lain yaitu sebagai akibat perluasan yang cepat. Fungsi kota menjadi serbaguna. Selain berfungsi sebagai pusat ekonomi yang utama, kota ini juga berfungsi sebagai pusat jaringan eksploitasi kolonial. Di tempat inilah lembaga-lembaga kapitalisme terpusat dalam menguasai ekonomi tanah jajahan, seperti bank, maskapai perdagangan, maskapai pelayaran dan maskapai asuransi. Kota kolonial umumnya merupakan kota pelabuhan besar yang memegang peran dalam ekspor dan impor dari dan ke tanah jajahan.

Kota semacam ini sebenarnya merupakan perantara ekonomi antara penguasa metropolitan dan tanah jajahan. Tidak mengherankan bahwa kebanyakan struktur pekerjaan penduduk kota lebih banyak yang hidup dalam sektor tertier. Akhirnya kota-kota besar ini cenderung untuk bersifat parasitik terhadap daerah pedesaan. Selain kota Batavia, kota Semarang dan kota Surabaya pada akhir abad ke-19 cenderung menjadi kota besar yang memiliki ciri tersebut di atas.

Di luar kota kolonial yang muncul kota-kota yang bergaya baru tetapi dalam corak lain yaitu kota "priyayi" atau kota administratif.

#### IV. DARI KOTA ISTANA KE KOTA PRIYAYI

##### 1. Kota Istana

Tipe kota istana Jawa dapat dijumpai dalam ibukota kerajaan Mataram, yang terletak di pedalaman dan tumbuh pada abad 17 setelah keruntuhan kerajaan Demak dan Pajang. Surplus pertanian merupakan faktor yang menjadikan kota dan kerajaan Mataram secara mantap dibangun, dan mampu melahirkan struktur sosial dan kebudayaan yang tinggi. Ada tanda dasar-dasar bangunan kota istana serta konsepsi kosmologis kota unsur-unsur budaya kraton pada masa Majapahit memberi alas bagi terbentuknya kebudayaan kraton Mataram, baik secara fisik maupun spiritual. Tipe bangunan kota istana yang berpangkal pada istana sebagai pusat pemerintahan dengan diperlengkapi alun-alun di muka istana dan bangunan mesjid di sebelah kiri (bagian barat) alun-alun makin dimantapkan; dalam bidang pemerintahan sempat dibangun sistem birokrasi patrimonial yang mampu melancarkan pemerintahan konsentris. Konsep kota pada dasarnya sejalan dengan konsep pemerintahan patrimonial, yang dalam hal ini bersifat sentrivokal pada istana. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa konsep kota pada jaman Mataram tergambar pada pembagian wilayah atas :

- (1) Negara Agung;
- (2) Manca Negara;
- (3) Daerah Pesisir Barat dan Timur.

Wilayah Negara Agung pada dasarnya berpusat pada keraton, yaitu kota tempat istana raja memerintah, yang oleh sementara orang disebut "kuthagara" (Ibu negara). Di luar wilayah kota ini masih terdapat daerah kawasan pemerintahan yang secara konsentris menjadi bagian kawasan yang pertama, demikian seterusnya pada daerah yang lebih jauh yaitu daerah pesisir.<sup>24</sup>

Melalui sistim birokrasinya dan sistim hubungan-hubungannya kebudayaan kraton dipatri sebagai pola dasar bagi kerangka acuan budaya

---

<sup>24</sup> Pembicaraan mengenai sistim birokrasi Mataram dan kerangka konseptual pembagian wilayah dengan sistim perhubungannya secara bagus dikupas oleh B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Part Two: Ruler and Realm in early Java* (Brussel, 's-Gravenhage: Uitgeversmaatschappij A. Munteau N.V.-Uitgeverij W. van Hoeve, 1959).

daerah yang ada di bawahnya. Bahasa, pakaian, bangunan rumah dan bahkan kemudian bangunan kota cenderung menampilkan pola dasar yang belaku di pusat.

## 2. Kota Priyayi

Proses birokratisasi yang dilancarkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19, diikuti dengan penyusunan kembali wilayah pemerintahan beserta pengangkatan pejabat pemerintah daerah yang tersebar di Jawa. Dengan pembagian wilayah administratif Jawa atas Karesidenan sejak jaman Raffles dan pembagian Karesidenan atas Kabupaten dan Kawedanan, sebagai unit pemerintahan yang ada di atas desa, maka diikuti pula dengan pengangkatan pejabat Residen, Bupati dan Wedana sebagai pimpinan kesatuan wilayah masing-masing. Bersamaan itu pula lokasi pusat pemerintahannya ditentukan. Lokasi pusat pemerintahan ini berinti pada tempat pemerintahan daerah, yang diikuti sebagai pusat permukiman para pejabat dan pegawainya. Tempat-tempat ini lambat laun berubah menjadi kota kecil setelah diikuti pertumbuhan pasar dan warung atau toko-toko kecil, dengan penduduk setempat yang semula kebanyakan telah ada sebelumnya, karena kebanyakan lokasi ibu kota pemerintahan ini diambil dari salah satu desa atau kota kecil yang sebelumnya telah ada. Kota Karesidenan biasanya lebih besar dibanding dengan kota Kabupaten dan demikian seterusnya bila dibanding dengan kota Kawedanan. Pada sekitar tahun 1874 tingkat Distrik dibagi lagi wilayahnya menjadi kesatuan wilayah Onder-district atau Kecamatan, sehingga kota-kota Kecamatan juga muncul sebagai kota kecil dan tersebar di daerah pedalaman.

Sesuai dengan dasar pertumbuhannya, maka kota-kota kecil ini lebih bersifat sebagai kota pegawai. Memang kemudian dari beberapa kota ini bisa juga berkembang menjadi kota dagang atau perantara kota besar dengan pedesaan. Namun corak administratif dari kotanya lebih menonjol.

Salah satu kota administratif yang memiliki gaya yang lebih khas adalah kota Karesidenan dan kota Kabupaten. Apabila kota Karesidenan sedikit diwarnai dengan sifat Eropa karena adanya tempat kediaman Residen dan pejabat Belanda lainnya, maka kota Kabupaten lebih bersifat pribumi. Namun kota Kabupaten memiliki gaya tersendiri yaitu gaya priyayi yang terbawa dari penampilan gaya

hidup dari golongan Bupati yang pada waktu itu menempati kedudukan sebagai golongan *Pangreh Praja*, suatu kelompok pejabat pemerintah Belanda yang umumnya terpelajar dan masih diakui lambang-lambang status aristokratnya.<sup>25</sup>

Lambang status yang disandang para Bupati tergambar dalam gaya pakaiannya, tanda-tanda pangkat, payung, rumah kediamannya dengan isi rumahnya. Bupati biasanya sekaligus menempati rumah dinas yang dibangun dengan pola dasar bangunan istana kecil, seperti bangunan tempat tinggal, pendapa, alun-alun, mesjid dan jalan-jalan, pohon beringin di tengah alun-alun, dan jalan-jalan di bagian luarnya. Secara kebetulan hampir bangunan pendapa kabupaten di kabupaten di daerah pesisir menghadap ke utara, yaitu menghadap arah laut, dan membelakangi pegunungan dan daerah agraris. Pada abad ke 19 sering mereka melakukan perjalanan keliling daerahnya, dengan membawa pengiring dan pengawalnya. Gaya priyayi yang diwakili oleh para Bupati inilah yang sering sebagai salah satu unsur budaya Jawa. Oleh Geertz malah dianggap sebagai salah satu kelompok sosial tersendiri yang memiliki aliran sendiri.

Keadaan kota-kota kabupaten, lebih-lebih kota-kota kawedanan dan kecamatan memang masih secara jelas corak pedesaannya, sebagai yang dilukiskan dari hasil perjalanan keliling seorang Bupati Kudus, Candranegara pada abad ke-19.<sup>26</sup>

## V. PENUTUP

Uraian di atas telah menggambarkan pertumbuhan berbagai jenis kota di Jawa yang mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, politik dan kultural. Konsep kota sekalipun secara tersamar terdapat dalam beberapa lingkungan sesuai dengan latar belakang budaya yang mendasarinya. Pembagian kota istana dan kota dagang di lain pihak telah memberikan cerminan

---

<sup>25</sup>Mengenai Priyayi Pangreh Praja dan gaya hidupnya dapat dibaca dalam H. Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite* (Asian Studies Association Australia, No. 2).

<sup>26</sup>Periksa Harya Candranegara, *Lampah-lampahipun Raden Mas Harya Purwalelana* (Huruf Jawa Cetak) (Batavia: O. Gelvi, N. Ko, 1880).

tentang penggolongan sosial dan budaya. Ada tanda-tanda bahwa di samping banyaknya unsur-unsur yang dibawa oleh perkembangan kota masih tampak adanya kekuatan budaya lokal, dalam hal ini Jawa, masih lestari mempengaruhi perkembangan barunya.

Corak kedesaan yang mewarnai dalam berbagai tingkat kota menandakan masih kuatnya sifat pedesaan dan tingkat hidup subsistennya. Gaya hidup priyayi pada dasarnya merupakan salah satu gaya hidup kota bagi golongan elite Jawa pada masa kolonial. Berbagai kecenderungan seperti tersebut di depan ada yang masih tampak dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dewasa ini.

**BEBERAPA ASPEK KEBUDAYAAN JAWA  
DALAM KEBUDAYAAN SUNDA**

Oleh :  
**Edi S. Ekadjati**



## BEBERAPA ASPEK KEBUDAYAAN JAWA DALAM KEBUDAYAAN SUNDA

Oleh :  
Edi S. Ekadjati

### I. PENDAHULUAN

Apa yang dikemukakan dalam makalah ini bukanlah merupakan hasil penelitian yang mendalam, akan tetapi lebih cenderung merupakan hasil penelaahan. Saya sendiri termasuk awam terhadap kebudayaan Jawa. Namun tampak jelas dapat dibedakan di dalam kebudayaan Sunda itu aspek-aspek yang berasal dari kebudayaan Jawa.

Dalam makalah ini tidak seluruh aspek yang berasal dari kebudayaan Jawa yang terkandung dalam kebudayaan Sunda dibicarakan. Di samping memang belum ada penelitian mengenai hal itu, juga makalah ini lebih cenderung dimaksudkan sebagai media yang bersifat informatif untuk menyodorkan masalah yang perlu ditanggapi dalam forum ini kemudian mungkin diteliti lebih lanjut bersama. Jadi, makalah ini dimaksudkan sebagai pembuka jalan bagi dilakukannya penelitian bersama antara Sundanologi dan Javanologi.

### II. HUBUNGAN ANTARA SUNDA DAN JAWA

Jika berita yang terdapat dalam prasasti Canggal<sup>1</sup> dan naskah *Carita Parahiyangan*<sup>2</sup> benar, maka paling tidak sampai dengan masa hidup raja Sanjaya (sekitar 732 Masehi) belum ada pemisahan antara Jawa dan Sunda. Soalnya, raja Sanjaya itu diakui oleh orang Sunda sebagai raja Sunda dan diakui pula oleh Jawa sebagai raja Jawa.

Menurut tradisi Sunda<sup>3</sup>, pemisahan antara Sunda dan Jawa terjadi pada masa hidup tokoh Hariang Banga dan Ciung Wanara. Kedua tokoh tersebut adalah putera raja Galuh. Karena persaingan dan membela haknya masing-masing, mereka bertarung habis-habisan sampai akhirnya keduanya terpisahkan oleh Sungai Cipamali (Kali Pemali).

Di tempat itu mereka berjanji bahwa mereka akan menghentikan

pertarungannya dan sejak itu dilakukan pembagian wilayah kekuasaan. Ciung Wanara menguasai daerah sebelah Barat Sungai Cipamali dan Hariang Banga menguasai daerah sebelah Timur sungai tersebut. Di sebelah Barat Sungai Cipamali kemudian tumbuh Kerajaan Pajajaran (Sunda) di bawah kekuasaan Ciung Wanara beserta keturunannya. Di sebelah Timur Sungai Cipamali tumbuh Kerajaan Majapahit (Jawa) di bawah kekuasaan Hariang Banga beserta keturunannya (Hermansoemantri, 1977 : 124 – 159; 1979 : 434 – 459).

Lepas dari benar-tidaknya tradisi tersebut secara historis, adalah suatu kenyataan bahwa masa kemudiannya paling tidak sejak zaman Raja Hayam Wuruk memegang takhta di Majapahit (1350 – 1389) antara Sunda dan Jawa makin terpisah kedudukannya, baik secara politis maupun secara kultural.<sup>4</sup> Pada tahun 1513 Tome Pires telah menyaksikan sendiri perbedaan nyata antara Sunda dan Jawa secara kultural, politis, dan geografis (Armando Cortesao, 1944 : 183), meskipun ia hanya menyusuri pesisir Utara saja.

Pemisahan Sunda dengan Jawa secara kultural pada awal abad ke-16 diakui pula oleh pihak Sunda (Atja dan Saleh Danasasta, 1981:18).

Perbedaan sosial budaya antara Sunda dan Jawa pernah dieksploitir oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dalam rangka menanamkan kekuasaan mereka di tanah air kita selama mungkin. Dalam hal ini perbedaan sosial budaya itu dipertajam sedemikian rupa, sehingga yang menonjol itu hanya perbedaan, bahkan pertentangan-nya<sup>6</sup>. Padahal sebagai masyarakat yang secara geografis bersatu dan dipererat oleh tingkat mobilitas sosial yang makin lama makin tinggi, maka tentu terjadi percampuran yang saling mempengaruhi antara kedua sosial budaya tersebut. Dalam makalah ini hanya akan dibicarakan beberapa aspek budaya Jawa yang masuk dan diterima oleh kebudayaan Sunda.

### **III. BEBERAPA ASPEK KEBUDAYAAN JAWA DALAM KEBUDAYAAN SUNDA**

Bukti pertama adanya unsur kebudayaan Jawa dalam kehidupan sosial budaya Sunda terdapat dalam prasasti Cibadak. Prasasti yang ditemukan di daerah Kabupaten Sukabumi itu bertititangsa 952 Saka atau 1030 Masehi (Pleyte, 1915).

Dibandingkan dengan prasasti-prasasti dan naskah-naskah Sunda kuna<sup>7</sup> lainnya, prasasti Cibadak (berjumlah 4 buah prasasti yang diberi nomor kode D 73, D 96, D 97, dan D 98), mengandung beberapa keganjilan yang diakibatkan oleh pengaruh budaya Jawa. Keganjilan-keganjilan itu antara lain, prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuna, penanggalannya lengkap, berisi sumpah dan kutukan magis, berulang kali (6 kali) menyebut dirinya raja Sunda (padahal prasasti itu dikeluarkan oleh raja Sunda), dan gelar raja yang panjang dan menyebut dirinya penjelmaan Wisnu, yaitu Sri Jayabhupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya, Sakalabhuwanamanadaleswaranindita Haro Gowārdhana Wikramatunggadewa (Saleh Danasmita, 1975 : 3 – 5).

Itulah sebabnya, beberapa sejarawan selalu menghubungkan Sri Jayabhupati itu sebagai raja Sunda bawahan raja Airlangga, atau tokoh pelarian dari Jawa Timur yang kemudian menjadi raja Sunda (Krom, 1956 : 137).

Memang data dari prasasti Cibadak itu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa tiba-tiba di tengah-tengah kerajaan Sunda muncul unsur-unsur kebudayaan Jawa ? Apalagi jika dihubungkan dengan masa sebelumnya dan masa sesudahnya, dapat dikatakan data itu terpencil cukup jauh. Mengapa sebagai raja Sunda, Sri Jayabhupati itu beberapa kali menyebut dirinya sebagai raja Sunda ? Timbul kesan seolah-olah dia itu bukan orang Sunda dan minta diakui sebagai orang Sunda, atau raja Sunda.

Ternyata, walaupun masih bersifat informatif, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu terdapat dalam karya tulis Pangeran Wangsakerta<sup>8</sup>. Menurut Pangeran Wangsakerta, Sri Jayabhupati itu menikah dengan seorang gadis dari Jawa Timur. Gadis itu adalah adik dari istri raja Airlangga.<sup>9</sup>

Timbulnya kembali unsur kebudayaan Jawa di daerah Priangan terjadi pada akhir abad ke-17 Masehi, yaitu dengan bermunculannya naskah berbahasa Jawa dan berhuruf Jawa. Pertama-tama dapat dikatakan sebagai bukti adalah *Kitab Waruga Jagat*.

Naskah ini yang ditulis dengan huruf Arab dan bahasa Jawa diperkirakan disusun pada akhir abad ke-17 Masehi<sup>10</sup>. Yang menarik perhatian dari naskah ini adalah isinya yang berorientasi ke Cirebon dan Mataram<sup>11</sup> yang sebelumnya tak pernah terjadi.

Naskah-naskah sebelumnya hanya berorientasi ke Pajajaran atau Sun-

da<sup>12</sup>. Dalam *Kitab Waruga Jagat* (KWJ) dikemukakan tentang tokoh Hariang Banga dan Ciung Wanara secara singkat sebagai cikal-bakal raja Majapahit dan raja Pajajaran. Tetapi berbeda dengan cerita legenda tersebut di atas, di sini cerita itu dilanjutkan dengan menyatakan bahwa Hariang Banga itu selain menurunkan raja-raja Majapahit, juga diteruskan dengan menurunkan raja-raja Mataram. Raja Mataram yang disebut terakhir adalah Susunan Amangkurat yang berputera Pangeran Dipati Anom.

Susunan Amangkurat itu disebutkan selanjutnya sebagai putera Susunan Tegalwangi, cucu Sultan Mataram (Atja, 1972, 13, 21).

Raja-raja Mataram yang tersebut dalam KWJ itu ialah Sultan Agung (1613 – 1645), Amangkurat I atau Sunan Tegalwangi (1645 – 1677), dan Amangkurat II (1677 – 1703).

Sedangkan Pangeran Adipati Anom naik takhta pada tahun 1703 dengan gelar Amangkurat III dan terkenal pula dengan sebutan Sunan Mas (Vlekke, 1967 : 449).

Walaupun tidak mengubah secara keseluruhan, namun orientasi historiografi (tradisional) Priangan ke Mataram makin lama makin meningkat. Selanjutnya, akan hanya mengungkapkan data-data saja berupa nama-nama raja secara berurutan, namun mengisahkan pula peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar keraton Mataram dan yang berkaitan dengan daerah Priangan<sup>14</sup>, bahkan kemudian ditambah pula dengan tafsiran-tafsiran mengenai kejadian itu<sup>15</sup>.

Bisa jadi peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah itu dianggap tidak penting bagi keraton Mataram, sehingga hampir tidak dimasukkan ke dalam historiografi tradisional Jawa<sup>16</sup>, maupun bagi orang Priangan hal itu tampaknya penting sekali.

Bukti kedua adalah naskah *Cariosan Prabu Siliwangi*. Seperti halnya KWJ, naskah *Cariosan Prabu Siliwangi* (CPS) pun diketemukan di lingkungan bangsawan Sumedang dan hingga sekarang disimpan di Museum Pangeran Geusan Ulun, Sumedang. Naskah CPS ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa, serta diperkirakan disusun pada akhir abad ke-17 Masehi. Berbeda dengan KWJ yang disusun dalam bentuk Prosa, CPS disusun dalam bentuk puisi, tembang macapat Jawa (Sunarto H dan Viviane Sukanda–Tessier, 1983:7–38). Berbeda dengan KWJ yang menyebut-nyebut raja Mataram, CPS hanya berisi tentang cerita kerajaan Pajajaran dengan tokoh utamanya Prabu Siliwangi, seorang raja Pajajaran yang termashur (Ibid halaman: 39–54).

Dengan demikian, aspek budaya Jawa yang diambil dalam naskah ini adalah mengenai bahasa, aksara, dan bentuk karangannya.

Menurut Sunarto H dan Viviane Sukanda – Tessier (1983 : 22, 25) tipe huruf yang digunakan dalam naskah ini termasuk tipe lama. Sementara bahasanya merupakan campuran antara bahasa Jawa Tengahan dan bahasa Jawa Pasisir (Cirebon). Bentuk karangannya merupakan tembang macapat Jawa, yang dapat dikatakan kukuh menggunakan aturan-aturan tembang<sup>17</sup>.

Sejauh pengetahuan saya, jika benar CPS disusun pada akhir abad ke-17 Masehi, naskah ini merupakan naskah Sunda pertama yang disusun dalam bentuk tembang. Jelas untuk karangan puisi tembang dalam karya-karya sastra Sunda diambil dari Jawa, sebab bentuk karangan puisi yang dikenal dalam sastra Sunda adalah pantun, yaitu bentuk puisi yang tiap-tiap baris terdiri atas delapan suku kata, misalnya pantun Ramayana (Noorduyn, 1971 : 151–157). Selanjutnya, pantun itu berkembang menjadi seperti bentuk prosa liris, karena berupa cerita yang dinyanyikan (Eringa, 1949: 1–9: Hermansoemantri, 1977 : 124).

Bentuk tembang dalam dunia sastra Sunda pernah mengalami perkembangan pesat, terutama dalam abad ke-19 sampai awal abad ke 20 Masehi. Pada masa itu banyak sekali karya tulis dalam bentuk tembang lahir, baik dalam ukuran pendek (berupa satu atau beberapa bait dalam pupuh tertentu)<sup>18</sup> maupun dalam ukuran panjang (berupa cerita yang disusun dalam bentuk pupuh dengan menggunakan beberapa jenis pupuh) yang biasa disebut wawacan<sup>19</sup>.

Banyak diantara wawacan-wawacan itu merupakan saduran dari karya tulis berbahasa Jawa, baik yang langsung datang dari Jawa<sup>20</sup>, maupun yang semula disusun di daerah Sunda sendiri<sup>21</sup>.

Pada masa jayanya bentuk tembang itu sampai hampir menjadi tolok ukur tinggi rendahnya kualitas sastrawan Sunda. Pengarang yang menghasilkan banyak karya tembang dan nilainya tinggi, dipandang sebagai sastrawan bermutu (pujangga). Walaupun demikian bentuk tembang dalam perkembangan budaya Sunda tidak sepenuhnya berdasarkan bentuk tembang macapat Jawa.

Dalam perkembangannya bentuk tembang itu mengalami perubahan dan penyesuaian dengan pola dan lingkungan kebudayaan Sunda, terutama yang bertalian dengan seni sastra dan seni suara.

Meskipun bentuk *pupuh* yang 17 diambil dari Jawa, tetapi dalam perkembangannya sistem *sekar ageng* dan *sekar alit* yang dikenal di Sunda memilih *pupuh* yang berlainan dari pada yang dikenal di Jawa. Tembang Cianjuran yang pada mulanya didasarkan pada tembang *macapat*, kemudian dikembangkan dengan memasukkan pengaruh lagu *degung* dan *pantun* yang khas Sunda, sehingga ia mempunyai warna sendiri. Dalam bentuknya sekarang tembang Cianjuran tidak lagi punya persamaan dengan tembang Jawa, kecuali dalam hal bentuk *pupuhnya*. Lagunya sendiri betul-betul Sunda (Ajip Rosidi, 1980: 99).

Sehubungan dengan sangat populernya dan intensifnya penciptaan karya tulis, terutama karya sastra dalam bentuk tembang, maka dirasakan perlu adanya buku pegangan yang memuat patokan-patokan tembang itu.

Hal itu disebabkan sering terjadinya muncul tembang yang dipandang dari segi patokan tembang, melanggar aturan. Dalam hal ini lahirlah buku pegangan itu karya R. Satjadibrata, seorang pengarang produktif, yang diberi judul : *Rasiah Tembang Sunda* 1953.

Apa yang dikenal di Jawa dengan *macapatan*, di Sunda hal itu disebut *beluk*. Setelah saya mengikuti acara *macapatan* pada Proyek Javanologi satu kali, saya menyaksikan dan merasakan adanya persamaan dan perbedaan dengan *beluk* di Sunda. Perbedaan yang menyolok terletak pada lagu.

Di Sunda lebih bebas dalam membuat variasi lagu. Dalam pada itu, beberapa sastrawan Sunda menggunakan bentuk tembang hanya sebagai media untuk menciptakan karyanya saja. Karena itu sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan *pupuh*, terutama mengenai watak *pupuh*. Haji Hasan Mustapa (lebih kurang 1858 – 1938) dipandang sebagai sastrawan Sunda yang telah berhasil baik menciptakan karya-karyanya yang tinggi mutunya sebagai karya sastra yang diwujudkan dalam bentuk tembang (Ajip Rosidi, 1983 : 55 – 87).

Bukti ketiga sebagai contoh masuknya aspek budaya Jawa ke dalam kebudayaan Sunda adalah naskah keagamaan (budaya Islam, tarekat) karangan Kiai Muhyidin dari desa Karang, Tasikmalaya Selatan. Naskahnya sendiri ditemukan di desa Limustilu, Garut Selatan pada tahun 1981. Ditinjau dari jenis kertas dan

tinta yang digunakannya, dapat diperkirakan naskah itu berasal dari abad ke-18 Masehi. Naskah ini ditulis dalam aksara Arab dan bahasa Jawa serta berisi ajaran Agama Islam tentang tarekat. Naskah ini masih sedang diteliti.

Munculnya naskah keagamaan Islam berbahasa Jawa di wilayah Sunda tidaklah mengherankan, karena arus masuknya agama Islam ke wilayah ini cenderung datang dari timur, seperti disaksikan oleh Tome Pires dan J. De Barros pada tahun 1513 dan 1527 (Armando Cortesao, 1944 : 183; Hageman, 1867 : 196 – 199). Begitu pula dalam peningkatan penguasaan ilmu agama Islam pun arus ilmu itu cenderung mengalir dari timur, walaupun tak sepenuhnya karena ada pula arus yang datang dari barat dan utara.

Sampai dengan abad ke-19 Masehi santri dari Sunda yang belajar lagi di pesantren Jawa Timur banyak yang menjadi kiai (ulama) terkenal. Atau santri keluaran pesantren di Sunda jika ingin memperdalam lagi ilmu agamanya banyak yang belajar lagi di pesantren-pesantren di Jawa, terutama Jawa Timur. Dalam pada itu, kitab-kitab yang dipelajari dan menjadi pedoman di pesantren-pesantren di wilayah Sunda umumnya berbahasa Jawa, di samping tentunya berbahasa Arab. Hal itu berlangsung sampai memasuki abad ini, bahkan di kalangan tertentu berlangsung sampai dewasa ini.

Berbeda dengan naskah KWJ dan CPS yang tak diketahui identitas penyusunannya, naskah tarekat ini mengungkapkan sedikit identitas penyusunannya, yaitu bernama Kiai Muhyidin, putera Syekh Abdulmuhyi, dari desa Karang<sup>22</sup>

Syekh Abdulmuhyi adalah ulama terkemuka di daerah Priangan Selatan yang menyebarkan Agama dan ilmu Agama Islam terhadap penduduk di wilayah itu pada abad ke-17 Masehi, atau sesudah periode Wali Sanga (Kosim dkk. 1975). Tarekat yang dimuat oleh Syekh Abdulmuhyi rupanya sejalan dengan Abdurrauf di Aceh (Rinkes, 1909). Karena itu, tidak aneh jika pada abad ke-18 puteranya, Kiai Muhyidin, telah dapat menyusun karangan mengenai ilmu agama Islam (tarekat). Syekh Abdulmuhyi menurut sebuah sumber, berasal dari Gresik (Kosim dkk, 1975).

Namun kiai Muhyidin sendiri tentunya seorang yang dilahirkan

dan dibesarkan di tanah Sunda, walaupun mungkin pernah belajar di pesantren Jawa.

Meskipun penyusun KWJ dan CPS tak diketahui identitasnya, namun dapat diduga bahwa keduanya adalah orang Sunda atau orang yang dibesarkan dalam lingkungan sosial budaya Sunda, tetapi pernah belajar atau mempelajari bahasa Jawa. Hal itu dapat dilihat dari bahasa Jawa yang digunakan untuk menyusun isi naskah-naskah itu adalah bahasa Jawa yang bercampur bahasa Sunda, sehingga dapat dikatakan bahasanya bahasa Jawa–Sunda. Percampuran itu menyangkut pemasukan kata-kata bahasa Sunda dan penjawaan kata-kata bahasa Sunda.<sup>2 3</sup>

Aspek kebudayaan Jawa lain yang memasuki kebudayaan Sunda adalah soal *undak–usuk basa* (unggah–ungguh), atau tingkatan bahasa. Dalam masyarakat Sunda lama tidak dikenal penggunaan *undak–usuk basa* yang mencerminkan perbedaan status sosial. Masyarakat Kanekes di Banten selatan yang terisolir dan bersikap mempertahankan sosial budaya lama serta naskah-naskah Sunda lama (abad ke-16) merupakan bukti otentik mengenai hal itu. *Undak–usuk basa* mulai nampak dalam naskah-naskah Sunda kemudian, terutama sejak abad ke-19 Masehi, sejak naskah-naskah itu ditulis oleh pengarang yang berasal dari kalangan pendopo kabupaten.

Dalam Bahasa Sunda dikenal tiga tingkatan dalam *undak–usuk basa*, yaitu *basa lemes* (bahasa halus), *basa sedang* (Bahasa sedang), dan *basa kasar* (bahasa kasar). *Basa lemes* dan *basa kasar* dapat dibagi lagi masing-masing atas *basa lemes pisan* (bahasa halus sekali) dan *basa lemes*, *basa kasar* dan *basa kasar pisan*. *Basa lemes* digunakan terhadap orang yang dihormati, lebih tinggi kedudukan, status sosial, dan usianya, *basa sedang* digunakan terhadap orang yang sederajat kedudukan, status sosial, dan umur, *basa kasar* digunakan terhadap orang yang lebih bawah kedudukan, status sosial, dan usianya, serta digunakan oleh orang yang sedang marah. Kata-kata *basa lemes* banyak diambil dari perbendaharaan bahasa Jawa, seperti *dahar*, *dawuh*, *paras*, *rawuh*, *rungu*.

Pada mulanya pemakaian *undak usuk basa* itu hanya terbatas di lingkungan pendopo kabupaten (*padaleman*) saja. Kemudian

pemakaiannya menyebar ke kalangan guru-guru dan murid-murid sekolah Belanda.

Pada saat pengajaran dilakukan melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka *undak usuk basa* pun menjadi bagian yang harus dipelajari oleh setiap orang Sunda yang terpelajar. Intensifikasi pengajaran *undak usuk basa* dilakukan pada awal abad ke-20, seiring dengan banyak didirikannya sekolah-sekolah oleh pemerintah Kolonial termasuk di desa-desa (Ajip Rosidi, 1980 : 103). Dengan demikian, selanjutnya *undak usuk basa* itu menyebar ke kalangan masyarakat, sebab timbul anggapan bahwa yang tidak menggunakan *undak usuk basa* dipandang sebagai orang yang tidak sopan, tidak terpelajar (*dusun, urang kampung bau lisung*). Selanjutnya *undak usuk basa* dimasukkan dalam ruang lingkup tatakrama (Adiwidjaja, Satjadibrata, 1946). Kini *undak usuk basa* itu sudah mulai ditinggalkan orang Sunda, terutama kalangan generasi muda. Bahkan, sejumlah pengarang Sunda berpendapat lebih baik *undak usuk basa* itu dihilangkan saja, karena mempersulit anak dalam belajar bahasa Sunda yang baik dan tidak sesuai dengan alam demokrasi.

Aspek kebudayaan Jawa lain yang masuk dan diterima oleh kalangan masyarakat Sunda ialah sistem penanggalan Jawa yang mulai diberlakukan oleh Sultan Agung (Pigeaud, I, 1967 : 32–33). Mungkin sekali pada mulanya sistem penanggalan Jawa itu diterima oleh kalangan bangsawan Sunda. Mereka mengenalnya melalui piagam pengangkatan Sultan Mataram atas para bupati dan pejabat kabupaten lainnya di Priangan<sup>24</sup>, serta piagam penghargaan Sultan Mataram kepada orang-orang Priangan yang dianggap berjasa terhadap Mataram<sup>25</sup>, surat-surat perintah, dan lain-lain.<sup>26</sup> Selanjutnya sistim penanggalan itu digunakan oleh para penulis naskah, baik dari kalangan bangsawan, santri, maupun rakyat. Penanggalan itu ada yang dilengkapi dengan tahun Hijrah, dan kemudian ditambah pula dengan tahun Masehi.

Sekedar contoh, beberapa penanggalan itu adalah sebagai berikut :

(1) Penanggalan pada surat piagam :

- a) *Kala anurat ing dina Saptu tanggal ping sanga, wulan Muharam taun Alip* (Piagam Pengangkatan, Sultan Mataram atas Bupati Bandung, Sukapura, dan Parakanmuncang).

- b) *Kala ditulis ing dinten Kemis Sasi Rabi'ul Awal, tanggal ping gangsal welas, ing tahun Wau, Ijrah 1121. (Piagam dari Kyai Mas Tumenggung Mangkunegara untuk Mas Wangsapada).*
- c) *Kala nulis ing dina Salasa, tanggal 22 Wulan Hapit tahun He, Ijrah 1244, hijrah Kumpeni 1829 (Piagam dari Kanjeng Dalem Adipati Wiranatakusumah, Bupati Bandung untuk Aki Kartamanggala).*
- (2) Penanggalan pada naskah :
- a) Naskah KWJ : *Tutuging tulis ing malem Salasa Wulan Rayagung ping wolu tahun Alip hijrah 117.*
- b) Naskah *Sejarah Sukapura* :
- "Nalika kula ngagurit,  
bulan Haji tanggal lima,  
poe Saptu pasosore,  
Hijrah Kanjeng Rasulullah,  
nu mashur dina almenak,  
sarebu jeung tilu ratus  
punjul tilu ti taun Dal.*

Penggunaan sistem penanggalan Jawa secara intensif dalam kegiatan tulis-menulis dan mungkin juga kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Sunda berlangsung sampai dengan akhir abad ke-19 Masehi.

Sejak awal abad ke-20 sistem penanggalan Jawa sudah mulai ditinggalkan, tergeser oleh penggunaan sistem penanggalan Hijrah dan terutama sistem penanggalan Masehi. Hal itu kiranya disebabkan oleh makin meluasnya sistem pendidikan model Barat di tanah Sunda, sementara para penulis bermunculan dari kalangan guru dan pegawai negeri lainnya. Kini sistem penanggalan Jawa sudah tidak berfungsi lagi dalam masyarakat Sunda.

Munculnya surat-surat piagam dari Sultan Mataram untuk para bupati dan para pejabat Priangan lainnya yang tentu ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa, memungkinkan lahirnya tradisi surat-menyurat dan penulisan naskah ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa. Begitu intensifnya bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa tulisan dalam kehidupan masyarakat Sunda sehingga mendesak penggunaan bahasa Sunda sendiri. Selama abad ke-18 dan separuh dari abad ke-19 Mase-

hi kegiatan tulis-menulis di tanah Sunda hampir dikuasai oleh bahasa Jawa, terbukti dari hasil-hasilnya yang ada.

Kegiatan tulis-menulis dalam bahasa Sunda hanya berlangsung di tempat-tempat terpencil, misalnya di pertapaan Gunung Kumbang, Garut Selatan (Atja, 1970).

Ada pendapat (Kern, 1898 : 8) bahwa pada masa itu bahasa Jawa berfungsi sebagai bahasa resmi (*diensttaal*) di tanah Sunda, walaupun bahasa lisan tentunya masih tetap menggunakan bahasa Sunda.

Begitu terbiasanya bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa tulisan, sehingga tatkala Haji Muhammad Musa, seorang Hoofd penghulu Limbangan dan pengarang terkenal yang muncul sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, secara sadar ingin menulis dengan menggunakan bahasa Sunda, dengan terus terang menyatakan kesulitannya karena ternyata karangannya selalu bercampur dengan Bahasa Jawa (Muchamad Moesa, 1867). *Wawacan Sajarah Galuh* yang disusun sekitar pertengahan abad ke-19 Masehi merupakan bukti pertama mulai berfungsinya lagi bahasa Sunda sebagai bahasa tulisan (Ekadjadi, 1982: 19 : 1981). Memang kata-kata bahasa Jawa kemudian cukup banyak masuk dalam perbendaharaan bahasa Sunda.

Aspek kebudayaan lain yang terakhir ingin dibicarakan di sini adalah tentang pola ibukota kabupaten di Priangan yang kiranya meniru dari pola ibukota kerajaan Jawa. Dalam hal ini, alun-alun sebagai pusat ibukota kabupaten. Kemudian di sebelah Selatan alun-alun berdiri kantor dan rumah kediaman Bupati, di sebelah Barat alun-alun berdiri mesjid, di sebelah Timur berdiri penjara, (di sebelah Utara berdiri rumah pejabat Belanda/Asisten Residen), dan di tengah alun-alun ditanam pohon beringin. Kiranya pola tersebut mengikuti pola ibukota Kerajaan Ngayogyakarta yang masih bisa kita saksikan. Kini pola demikian dengan beberapa perubahan masih dapat disaksikan di beberapa kabupaten di Jawa Barat, misalnya Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur.

#### IV. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian di atas yang serba ringkas tampak bahwa sejumlah aspek kebudayaan Jawa masuk dan diterima oleh masyarakat Sunda. Namun penerimaan kebudayaan luar tersebut tidaklah diterima begitu saja dan dipakai sepenuhnya seperti di tempat asalnya, melainkan kemudian mengalami proses pengolahan sehingga lama-kelamaan tidak terasa asing lagi melainkan terasa sebagai milik sendiri.

Faktor-faktor yang sulit dikembangkan sesuai dengan perkembangan budaya Sunda, pada tahap tertentu mengalami saringan dan kemudian ditinggalkan. Secara dinamis dan kreatif pendukung-pendukung kebudayaan Sunda menerima dengan tangan terbuka aspek-aspek budaya luar. Hal itu memberi kemungkinan makin kayanya khazanah budaya Sunda seiring dengan perkembangan sejarah, walaupun kadang-kadang pada tingkat tertentu mendesak pula aspek kebudayaan yang sudah ada.

## CATATAN REFERENSI

<sup>1</sup> Prasasti yang ditemukan di Canggal, Kedu, itu bertitimgsa tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Dalam Prasasti ini disebut nama raja Sanna dan Sanjaya. Kedua raja itu dipandang cikal-bakal raja-raja Mataram. Lihat : Nugroho Notosusanto dkk. (1975 : 82-84).

<sup>2</sup> Naskah yang diketemukan di Ciamis ini ditulis dalam huruf dan bahasa Sunda kuna. Naskah ini disusun sekitar awal abad ke-16 Masehi. Dalam naskah ini disebut pula nama raja Sena dan Sanjaya. Mereka adalah raja Galuh yang kemudian menurunkan raja-raja Sunda. (Lihat : Atja 1981).

<sup>3</sup> Tradisi ini terkenal dengan cerita *pantun*, berjudul Ciung Wanara.

<sup>4</sup> Sunda termasuk wilayah yang disebutkan dalam Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang akan ditundukkan olehnya. Rencana ini kemudian dimasukkan ke dalam masalah pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Sunda sehingga terjadilah peristiwa Bubat tahun 1357. Lihat : Nugroho Notosusanto dkk (1975 : 263-264).

<sup>5</sup> Pengakuan ini tertera dalam naskah Sunda kuna yang berjudul Siksa Kanda Ng Karesian dan bertitimgsa 1440 Saka atau 1518 Masehi. Menurut naskah ini, "bila kita (orang Sunda) pergi ke Jawa, tidak mengikuti bahasa dan adatnya, termangu-mangu perasaan kita. Setelah kita kembali ke Sunda, tidak dapat berbahasa Jawa, seperti yang tidak pernah bepergian, karena tidak dapat mempelajari bahasanya".

<sup>6</sup> Misalnya, dalam kasus perlawanan Dipati Ukur terhadap Mataram, justru ditafsirkan sebagai pertentangan antara Sunda dan Jawa. Lihat : J.A. van der Chijs (1880 : 128-138).

<sup>7</sup> Prasasti-prasasti sebelum itu (masa Tarumanagara) berbahasa Sanskerta, berhuruf Pallawa, sedangkan sesudahnya berbahasa dan berhuruf Sunda Kuna. Naskah-naskah yang berasal sebelum abad ke-17 menggunakan bahasa dan huruf Sunda Kuna.

<sup>8</sup> Karya tulis Pangeran Wangsakerta terdiri atas tiga seri karangan, yaitu Negarakertabhumi, Pustaka Pararatuan i bhumi Jawadwipa, dan Pustaka Pararatuan i bhumi Nusantara. Karya tulis tersebut

disusun di Cirebon pada akhir abad ke-17 Masehi dalam huruf dan bahasa Jawa–Cirebon.

<sup>9</sup> Berhubung dengan belum selesai diteliti, keterangan ini hanya sebagai informasi saja.

<sup>10</sup> Naskah ini disimpan di Museum Pangeran Geusan Ulun, Sumedang dan merupakan warisan di kalangan bangsawan Sumedang. Mungkin sekali naskah ini ditulis di Sumedang oleh kalangan bangsawan Sumedang. Naskah ini bertitimpangsa malam Selasa, 8 Rayagung tahun Alip, 1117 Hijrah yang ditafsirkan sekitar tahun 1681–1707 Masehi, yaitu masa pemerintahan bupati Sumedang Pangeran Rangga Gempol III, atau mungkin lebih dekat dengan tahun 1695. Lihat : Atja dan Didi Suryadi, (1972 : 4–5).

<sup>11</sup> Orientasi tersebut berwujud silsilah raja-raja yang memerintah di Cirebon dan Mataram. Silsilah yang menurunkan raja Mataram adalah : Ratu Galuh berputera Hariang Banga, berputera Ki Gedeng Matalarasa, berputera Ki Gedeng Mesir, berputera Ratu Majapahit, berputera Ki Gedeng Jati, berputera Ki Gedeng Kartadipura, berputera Ki Gedeng Sari, berputera Ki Gedeng Kacung, berputera Ki Gedeng Suruwud, berputera Pangeran Sedang Karapyak, berputera Pangeran Sedang Kamuning, berputera Sultan Mataram, berputera Susunan Tegalwangi, berputera Susunan Mangkurat, berputera Pangeran Dipati Anom.

<sup>12</sup> Naskah *Siksa Kanda Ng Karesian* (1518), *Carita Parahiyangan*, naskah *Ciburuy* (Kropak 632), dan peta Ciela hanya membicarakan tentang kerajaan di Sunda atau yang ada sangkut-pautnya dengan kerajaan Sunda.

Sejaman dengan naskah KWJ masih ada naskah yang telah memasukkan orientasi ke Mataram, yaitu naskah *Carita Waruga Guru* (Pleyte, 1913 : 362–380). Tetapi naskah ini ditulis dalam bahasa Sunda dan huruf Sunda serta diperkirakan disusun pada awal abad ke-18 Masehi.

<sup>13</sup> Masuknya kekuasaan Mataram ke Priangan terjadi sekitar tahun 1620–1625. Kekuasaan itu berakhir pada tahun 1705, tatkala Sultan Mataram menyerahkan wilayah tersebut kepada Kumpehi sebagai imbalan atas ikut campurnya Kumpehi dalam menyelesaikan kemelut di keraton Mataram. Penyerahan wilayah itu dilakukan melalui perjanjian yang ditandatangani tanggal 5 Oktober 1705 (Rees, 1880 : 54–58).

<sup>14</sup> Misalnya, kisah yang terdapat dalam naskah LOr 7399(2), KBG513, LOr. 6499, LOr. 7915.

<sup>15</sup> Misalnya, kisah yang terdapat dalam naskah LOr. 7905, LOr. 7858, *Babad Sumedang*.

<sup>16</sup> Dalam *Babad Kraton* (Naskah Add. 123421) dan *Babad Tanah Jawi* hanya dikemukakan secara selintas mengenai perlawanan Dipati Ukur terhadap Mataram. Kuantitas ceritanya hanya dua halaman, dari hampir 10.000 halaman.

<sup>17</sup> Menurut penyusunnya, kesalahan atau kelainan atas aturan itu hanya sekitar 3,5 %.

<sup>18</sup> Misalnya, *Heh Barudak* dalam pupuh Maskumambang; *Laut Kidul* dalam pupuh Dandanggula; *Eling-eling* dalam pupuh Asmarandana; *Peuyeum Sampeu* dalam pupuh Magatru; *Budak Leutik Bisa Ngapung* dalam pupuh Kinanti.

<sup>19</sup> Misalnya, Wawacan Batara Rama, Wawacan Rengganis, Wawacan Purnama Alam, Wawacan Ogin, Wawacan Amir Hamzah, Wawacan Mahabarata, Wawacan Ranggawulung, Wawacan Babar Nabi, Wawacan Sajarah Galuh, Wawacan Dipati Ukur, Babad Sumedang.

<sup>20</sup> Misalnya, Wawacan Batara Rama, Wawacan Rengganis, Wawacan Mahabarata, Babad Cirebon.

<sup>21</sup> Misalnya, Wawacan Dipati Ukur, Wawacan Dipati Imbanagara, Wawacan Juag Tati.

<sup>22</sup> Tempat tersebut sekarang bernama Karangnunggal, merupakan sebuah kota kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebelah selatan. Makam Syekh Abdulmuhyi yang terletak di desa Pamijahan, sebelah barat daya Karangnunggal, sampai sekarang masih dianggap keramat dan banyak diziarahi orang, terutama pada bulan Maulud. Dekat makam tersebut terdapat sebuah gua yang kisahnya dihubungkan dengan kegiatan Syekh Abdulmuhyi dalam penyebaran ilmu agama Islam.

<sup>23</sup> Misalnya dari naskah CPS : amungkusaken, bilas, bobojong, bobokong, cala-culu, gawayah, kadangu, kaharti, kanjut.

<sup>24</sup> Misalnya, Surat Piagam pengangkatan Ngabehi Wirawangsa, Ngabehi Samahita, Ngabehi Astramanggala menjadi masing-masing bupati Sukapura, bupati Parakanmuncang, dan bupati Bandung oleh Sultan Mataram dengan gelar Tumenggung Wiradadaha, Tumenggung Tanubaya, dan Tumenggung Wira Angun-angun. Lihat : Holle (1869: 341-343).

<sup>25</sup> Misalnya, Surat Piagam penghargaan Sultan Mataram kepada Ki Mukarab, penduduk Cikeruh, yang cacat tangannya sewaktu ikut mengepung kota Batavia. Ia dimerdekakan dari pajak beserta anak-cucunya. Lihat : Holle (1864 : 492—493).

<sup>26</sup> Misalnya, surat piagam tentang pencacahan jiwa penduduk daerah Sukapura dan penitipan beberapa orang tokoh dan kiai setempat yang dilakukan oleh Puspawangsa. Lihat : Holle (1869 : 345—347).

## KEPUSTAKAAN

Adiwidjaja, R. I.

1939 *Oendak-oesoek Basa Soenda*. Bale Poestaka, Djakarta.

Atja.

1970 *Tjarita Ratu Pakuan*. Lembaga Bahasa dan Sedjarah, Bandung.

Atja dan Didi Suryadi.

1972 *Kitab Waruga Jagat*. Lembaga Kebudayaan Unpad, Bandung.

Atja dan Saleh Danasasmita.

1981 *Carita Parahiyangan*, Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, Bandung.

1981a *Sanghyang Siksakanda Ng Karesian*. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, Bandung.

1981b *Amanat dari Galunggung*. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, Bandung.

Chijs, J.A. van der.

1880 *Babad Tanah Pasundan*. Landsdrukkerij, Batavia.

Corteseo, Armando.

1944 *The Suma Oriental of Tome Pires*, The Hakluyt Society, London.

Danasasmita, Saleh

1975 *Hubungan antara Sri Jayabhupati dengan Prasasti Gegerhanjuang*. Lembaga Kebudayaan Unpad, Bandung.

Ekadjati, Edi S.

1982 *Cerita Dipati Ukur*; Karya Sastra Sejarah Sunda, Pustaka Jaya, Jakarta.

Graaf, H.J. de

1958 *De Regering van Sultan Agung, vorst van Mataram*. 1613–1645, VKI, 's-Gravenhage.

Haan, F. de

1910,1911, *Priangan: de Preanger-Regentschappen Onder het Neder-*  
1912 *landsch bestuur tot 1811*, BGKW. Batavia.

Hageman Cz, J.

1867 "Geschiedenis der Soenda-landen". *TBG*, 16, hal. 193-251.

Hermansoemantri, Emuch

1978 "Analisis Cerita Pantun Ciung Wanara", *Bunga Rampai Ilmu Sastra*, Fakultas Sastra Unpad, Bandung.

Hermansoemantri, Emoech

1979 *Sadjarah Soekapoera*. Disertasi, Universitas Indonesia Jakarta.

Holle, K. F.

1864 "Pijagem van den vorst van Mataram". *TBG*, XIII.

Holle, K. F.

1869 "Bijdragen tot de Geschiedenis der Preanger Regentschapen", *TBG*, 17, hal. 316-367.

Kern, R. A.

1898 *Geschiedenis der Preanger Regentschappen*; kort overzigt. De Vries en Fabricius boekhandel, Bandoeng.

Kosim, dkk. E.

1975 *Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Pami-jahan, Tasikmalaya*. Fakultas Sastra Unpad, Bandung.

Krom, N. J.

1956 *Zaman Hindu* (terjemahan Arif Effendi), Pembangunan, Jakarta.

Moesa, R.H. Moechamad.

1867 *Dongeng-dongeng Pieunteungeun*.

Noorduyn, J.

1971 "Traces of an old Sundanese Ramajana Tradition". *Indonesia*, Cornell Modern Indonesia Project, 12, hal. -7.

Notosusanto, Nugroho & Marwati Djuned Puspongoro.

1975 *Sejarah Nasional Indonesia*, II, Balai Pustaka, Jakarta.

Pigeaud, Th. G Th.

1967 *Literature of Java*, I, KITLV, Martinus Nijhoff, The Hague.

Pleyte, C. M.

1913 "De Patapaan Adjar Soekaresi, anders Gezegd de kluizenarij op de Goenoeng Padang". *TBG*, 55.

1915 "Maharadja Çri Jayabhupati, Sunda's ouds Bekende vorst". *TBG*, 57.

Rinkes, D. A.

1909 *Abdoerraoef van Singkel*. Disertasi, Heerenoeen.

Rosidi, Ajip

1966 *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini*. Tjupumanik, Tjirebon.

1980 "Ciri-ciri Manusia Sunda dan Kebudayaan Sunda". *Masyarakat dan Kebudayaan Sunda*. PIPR, Bandung.

1983 *Ngalanglang Kasusastran Sunda*. Pustaka Jaya, Jakarta.

Rees, Otto van.

1880 "Overzigt van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen" *VBG*, XXXIX, hal. 1-156.

Satjadibrata, R.

1946 *Tatakrama Oerang Soenda*. Bale Poestaka, Djakarta.

1953 *Rasiah Tembang Soenda*. Bale Pustaka, tjit. kadua, Djakarta.

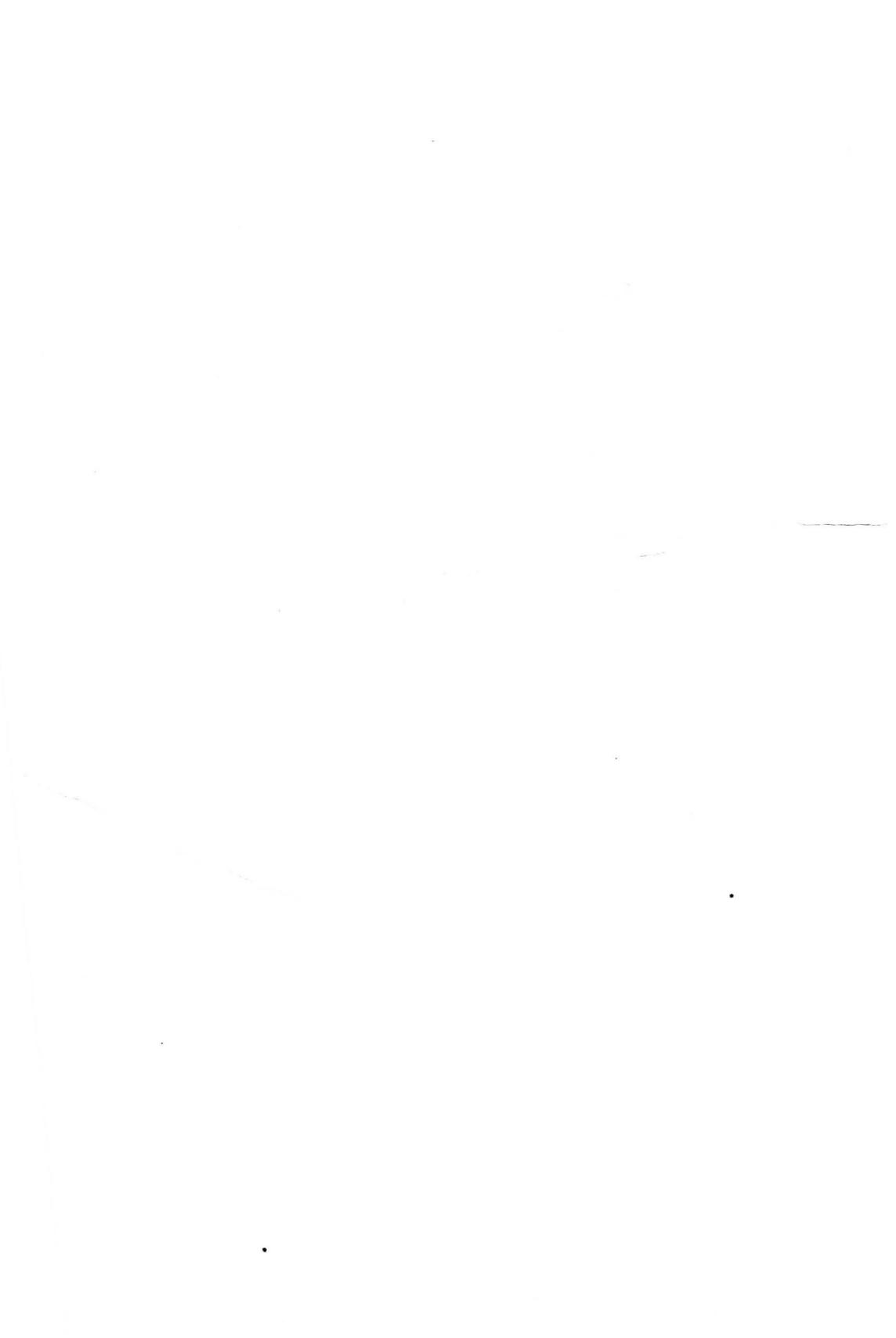
Sunarto H. & Viviane Sukanda-Tessier.

1983 *Cariosan Prabu Silihwangi*. EFEO, Jakarta-Bandung.

Vlekke, Bernard H.M.

1967 *Nusantara (Sejarah Indonesia)*. Dewan Pustaka, Kuala Lumpur.

\* \* \*



**DENGAN MEMBINA KEBUDAYAAN DAERAH  
TAMANSISWA MEMPERJUANGKAN KEBUDAYAAN  
NASIONAL**

Oleh :  
**Ki Suratman**



## DENGAN MEMBINA KEBUDAYAAN DAERAH TAMANSISWA MEMPERJUANGKAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Oleh :  
Ki Suratman

### I. PENDAHULUAN

TAMANSISWA lahir pada tanggal 3 Juli 1922, dengan nama aslinya "Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa", jika di Indonesia : Lembaga Pendidikan Nasional Tamansiswa. Pendirinya adalah Suwardi Suryaningrat dan kawan-kawan, sebagai hasil musyawarah suatu kelompok saresahan "Sloso-Kliwonan", yang memperhatikan situasi dan nasib bangsa Indonesia yang terjajah.

Warga Sloso-Kliwonan itu adalah pemuka-pemuka bangsa Indonesia, yang kebanyakan adalah tokoh-tokoh Hoofdbestuur Budi Utomo. Mereka itu adalah : R.M. Suwardi Suryaningrat, R.M. Soetarmo Soerjokoesoemo, R.M.H. Soerjo Poetro, Ki Pronowidigdo dan ketuanya Pangeran Soerjamataram I. Setelah mengadakan penelaahan yang mendalam mengenai keadaan bangsa Indonesia dan bagaimana mengusahakan agar bangsa Indonesia bisa maju dan menentukan nasibnya sendiri, saresahan berkesimpulan bahwa bangsa Indonesia harus *dididik*. Baru setelah bangsa Indonesia terdidik dan mengalami kemajuan, diharapkan bangsa ini akan dapat menentukan nasibnya sendiri.

Untuk memberi pendidikan kepada anak-anak Indonesia, tugasnya diserahkan kepada Suwardi Suryaningrat dan kawan-kawan, sedang untuk mendidik orang dewasa dipercayakan kepada Pangeran Soerjamataram dan kawan-kawan. R.M. Suwardi Suryaningrat, yang kemudian terkenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara, mendirikan Perguruan Kebangsaan Tamansiswa, sedang Pangeran Soerjamataram selanjutnya dikenal sebagai Ki Ageng Suryo Mentaram, menciptakan suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Ngelmu Begdjo.

Berdinya Tamansiswa ditandai dengan candrasengkala "Lawan

Sastra Ngesti Mulyo”, yang mencatat tahun Saka 1852 yang bertepatan dengan tahun Masehi 1922. Sebagai kalimat, candrasengkala tersebut mengandung makna : Dengan ilmu pengetahuan (kebudayaan) mengusahakan kemuliaan.

Pada saat setelah puluhan perguruan Tamansiswa berdiri di berbagai tempat/pulau di Indonesia, maka terbitlah gagasan untuk mempersatukannya (lahir eenheids-idee). Secara nasional dipandang perlu untuk mendirikan Hoofdraad (pimpinan pusat) pada tahun 1923 (M) atau 1854 (S). Peristiwa yang memiliki arti sejarah itu ditandai dengan candrasengkala ”Suci Tata Ngesti Tunggal”. Selain menandai tahun terjadinya peristiwa, kalimatnya berarti : Dengan kesucian batin dan ketertiban lahir mengusahakan persatuan.

Selain kedua candrasengkala tersebut yang jelas bernafaskan kejawaan (kejawen), maka saat itu banyak digunakan istilah-istilah Jawa untuk mengungkapkan berbagai pengertian yang lazim dipakai di kalangan Tamansiswa, seperti : pamong, paguron, sistem among, tutwuri-handayani dan sebagainya. Oleh karena itu adalah wajar jika hal demikian mudah menimbulkan kesan, bahwa Tamansiswa hakekatnya bercorak kejawaan atau kejawen. Apakah demikian kenyataan yang sebenarnya ?

## II. KI HADJAR DEWANTARA DAN TAMANSISWA

Suardi Suryaningrat memang seorang yang dilahirkan sebagai bangsawan Jawa dari lingkungan istana Pakualaman. Suardi adalah seorang putera Pangeran Suryaningrat, putera sulung Sri Paku Alam III dengan permaisurinya. Suardi yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 itu adalah cucu dari Sri Paku Alam III.

Putera kedua dari permaisuri dan Sri Paku Alam III adalah Pangeran Sasraningrat, yang juga ayah dari R.A. Sutartinah, yang kemudian dikenal sebagai Nyi Hadjar Dewantara. Jadi Ki dan Nyi Hadjar Dewantara adalah saudara sepupu.

Jiwa Suardi sangat peka terhadap keadaan lingkungannya, terutama mengenai kehidupan rakyat di luar istana yang sangat berbeda dengan kehidupan kerabat istana. Keadaan ekonomis yang sangat menyolok, keterbatasan hak yang ada pada rakyat dan berbagai ketimpangan sosial lainnya, menimbulkan sikap protes dalam

hati Suwardi, yang kemudian terpupuk menjadi dasar sifatnya yang *kerakyatan* dan *revolusioner*. Dalam perkembangan kepribadiannya selanjutnya, dikarenakan pengaruh lingkungan dan pendidikannya, Suwardi menjadi seorang yang berjiwa nasional, yang selalu tergelitik hatinya untuk mengadakan perubahan dalam peri kehidupan bangsanya.

Dalam seluruh kehidupan dan perjuangannya ternyata tokoh Ki Hadjar Dewantara sebagai pendiri Perguruan Tamansiswa tidak mungkin dipisahkan dari Tamansiswanya. Seolah-olah jiwa dan perjuangan Ki Hadjar sudah *menyatu* dengan Tamansiswa. Hal ini perlu dijelaskan, karena ada keterkaitannya dengan judul uraian ini.

Pada judul yang menjadi subyek uraian adalah Tamansiswa dalam kaitannya dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Tetapi Tamansiswa ini sebenarnya merupakan wadah untuk mewujudkan berbagai konsepsi Ki Hadjar, baik yang berkenaan dengan pendidikan, kebudayaan maupun kemasyarakatan. Sehubungan dengan itulah maka dalam uraian selanjutnya akan lebih banyak diuraikan mengenai konsepsi Ki Hadjar Dewantara khususnya yang berhubungan dengan pembinaan kebudayaan nasional.

Secara khusus perlu kiranya dijelaskan, bahwa Ki Hadjar mendefinisikan Tamansiswa itu sebagai : Badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, yang menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarannya. Dengan demikian wajarlah kiranya bahwa perjuangan Tamansiswa juga tidak mungkin lepas dari permasalahan kebudayaan tersebut.<sup>2</sup>

Dengan keterangan ini, maka Tamansiswa yang oleh masyarakat semula hanya dikenal sebagai usaha persekolahan saja, ternyata lebih luas lagi artinya. Tamansiswa ternyata bukan sekedar suatu sekolah, melainkan suatu lembaga yang juga memperjuangkan nilai-nilai budaya tertentu bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Bahkan Prof. Dr. M. Sardjito, waktu itu rektor Universitas Gadjah Mada selaku promotor dalam pemberian gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Kebudayaan kepada Ki Hadjar Dewantara (1956) menegaskan : "Sistem pendidikan yang diciptakan Ki Hadjar Dewantara itu dikehendaki merupakan alat untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu kebudayaan nasional".<sup>3</sup>

Ini lebih menguatkan, bahwa Tamansiswa bukan sekedar perguruan untuk mendidik kecerdasan, melainkan lebih dari pada itu.

### III MASALAH KEBUDAYAAN DAN KONSEPSI KI HADJAR DEWANTARA

Jika kita ingin memberikan batasan terhadap kebudayaan, maka akan kita ketemukan banyak sekali rumusnya. Menurut Kuntjaraningrat ada yang menginventarisasi sampai 160 macam.

Dalam bukunya *Pengantar Antropologi*, Kuntjaraningrat memberikan rumusan sebagai berikut : "Kebudayaan itu keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan, yang harus didapatkannya melalui belajar, dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat".<sup>4</sup>

Sedang melalui bukunya *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* dijelaskannya kembali bahwa "Kebudayaan yaitu seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia, yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar".<sup>5</sup>

Sidi Gazalba dalam bukunya *Pengantar Kebudayaan* sebagai Ilmu memberikan rumusan sebagai berikut : "Kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu".<sup>6</sup>

Dalam bidang kebudayaan ini, Ki Hadjar Dewantara selain mengemukakan definisinya, juga mempunyai konsepsi tentang pembinaan kebudayaan nasional. Konsepsi Ki Hadjar ini yang kemudian banyak dikenal sebagai Teori Tri-kon.

Mungkin sekali sebagai definisi kerja, Ki Hadjar Dewantara merumuskan kebudayaan sebagai berikut : "Kebudayaan, yang berarti buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat), dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai".<sup>7</sup>

Dalam penjelasannya Ki Hadjar lebih lanjut menguraikan tentang wujud dan berbagai kriteria tentang kebudayaan itu sebagai berikut :

- (1) Sebagai buah perjuangan manusia yang berada di dalam satu alam dan satu zaman, maka kebudayaan itu selalu bersifat

kebangsaan (nasional) dan mewujudkan sifat atau watak, yakni kepribadian bangsa. Dan inilah sifat kemerdekaan kebangsaan dalam arti kultural.

- (2) Tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidupnya masing-masing bangsa yang memilikinya; dalam hal ini keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakainya sebagai ukuran.
- (3) Tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman, selalu memudahkan dan melancarkan hidup serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup; sedang memudahkan serta memajukan berarti pula memfaedahkan dan mempertinggi hidup".<sup>8</sup>

Dengan mengambil macam-macam rumusan yang disusun oleh berbagai sarjana, Kuntjaraningrat berpendapat bahwa tujuh unsur kebudayaan sebagai *cultural universals* bisa didapatkan pada semua bangsa di dunia, ialah :

- (1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi dan sebagainya).
- (2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi).
- (3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekrabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- (4) Bahasa (lisan maupun tulis).
- (5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya).
- (6) Sistem pengetahuan.
- (7) Religi.<sup>9</sup>

Mengenai unsur ini, pada umumnya terdapat kesesuaian antara pendapat berbagai budayawan. Secara khusus Ki Hadjar mengingatkan, agar jangan sekali-kali memasukkan agama dalam unsur kebudayaan. Alasannya ialah, bahwa kebudayaan adalah hasil cipta manusia, sedang agama adalah wahyu Ilahi. Tetapi mengenai kehidupan beragama, sarana beribadah, bentuk tempat sucinya dan sebagainya bisa dimasukkan dalam unsur kebudayaan.

Mengenai pembinaan kebudayaan itu Ki Hadjar selalu mengingatkan kita semua agar memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Pemeliharaan kebudayaan harus bermaksud memajukan dan menyesuaikan kebudayaan dengan tiap-tiap pergantian alam dan zaman.
- (2) Karena pengasingan (isolasi) kebudayaan menyebabkan kemunduran dan matinya, maka harus selalu ada hubungan antara kebudayaan dengan kodrat dan masyarakat.
- (3) Pembauran kebudayaan mengharuskan pula adanya hubungan dengan kebudayaan lain yang dapat mengembangkan (memajukan, menyempurnakan) atau memperkaya (menambah) kebudayaan sendiri.
- (4) Kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri (kontinuitas), menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (konvergensi), dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (konsentrisitas).<sup>10</sup>

Dari rumusan yang empat jumlahnya itu, maka butir terakhir itulah yang dikenal sebagai teori Tri-kon. Dalam pembinaan kebudayaan harus selalu dijaga adanya kesinambungan atau kontinuitas dengan kebudayaan sendiri yang telah ada. Sedang konvergensi diperlukan, manakala kebudayaan kita harus berhubungan dengan kebudayaan bangsa lain yang sama-sama menuju ke arah kebudayaan manusia yang hakekatnya adalah tunggal. Kalau kebudayaan kita sudah bersatu di alam universal, kita telah mewujudkan persatuan dunia dan persatuan manusia, kita trapkan konsentrisitas. Kebudayaan semuanya itu bertitik pusat satu, namun masing-masing memiliki garis lingkarannya sendiri-sendiri.

Dari butir ketiga Ki Hadjar mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kebudayaan asing. Kita harus bersikap : selektif dan adaptatif. Kita jangan bersikap a-priori, bahwa kebudayaan asing mesti baik atau mesti buruk. Kita mesti mengadakan seleksi. Nilai budaya asing yang kiranya dapat memperindah, memperhalus, memperkaya, meningkatkan mutu kebudayaan kita, unsur-unsur demikian harus kita terima. Jika keadaannya adalah sebaliknya, wajib kita tolak. Hal-hal yang secara selektif dapat kita terima, maka perlu dilakukan adaptasi. Adapun maksudnya ialah agar masuknya unsur kebudayaan asing itu sebagai sesuatu yang tidak dipaksakan, tetapi harus disesuaikan dengan psikologi bangsa kita dan kondisi kebudaya-

yaan kita. Untuk seleksi digunakan Filter budaya Pancasila.

Meneliti butir pertama secara lebih mendalam, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa juga Ki Hadjar mengartikan kebudayaan sebagai proses, di samping kebudayaan sebagai gagasan, ide atau konsepsi. Tentang wujud kebudayaan itu Kuntjaraningrat menegaskan, bahwa kebudayaan itu sedikitnya mempunyai tiga wujud, ialah :

- (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>11</sup>

Jadi pada dasarnya wujud kebudayaan bisa berupa : kompleks ide atau gagasan yang sifatnya abstrak; suatu proses yang selalu berubah dan suatu produk seperti hasil-hasil kesenian dan sebagainya.

Mengenai pembinaan kebudayaan Indonesia, Ki Hadjar berpengharapan agar kita tetap optimis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Berhubung dengan tetap adanya kesatuan alam dan zaman, kesatuan sejarah (dulu dan sekarang), kesatuan masyarakat dan lain-lainnya, maka Kesatuan Kebudayaan Indonesia hanya soal waktu.
- (2) Sebagai bahan untuk membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia perlulah segala sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di seluruh daerah Indonesia dipergunakan untuk menjadi modal isinya.
- (3) Dari luar lingkungan kebangsaan perlu pula diambil bahan-bahan yang dapat memperkembangkan dan/atau memperkaya kebudayaan kita sendiri.
- (4) Dalam memasukkan bahan-bahan, baik dari kebudayaan daerah-daerah maupun dari kebudayaan asing, perlu selalu diingati syarat-syarat kontinuitas, konvergensi dan konsentrisitas tersebut di muka.
- (5) Jangan dilupakan, bahwa kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik, tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa, yakni kekhususan dan kepribadian dalam segala

sifat hidup dan penghidupannya, di atas dasar adab-kemanusiaan yang luas, luhur dan dalam.<sup>1 2</sup>

Bagi Ki Hadjar masalah kebudayaan Indonesia hanyalah soal waktu, asal bangsa Indonesia bersedia untuk melaksanakan butir kedua tersebut, ialah sanggup mengakui sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah Indonesia sebagai modal isinya. Inilah yang dikenal sebagai konsepsi Ki Hadjar sebagai Teori sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah.

Tentang hal ini terdapat kesalahfahaman, yang menganggap bahwa Ki Hadjar menghendaki adanya penggabungan (summing up) kebudayaan daerah tersebut sebagai kebudayaan Indonesia. Hal demikian bukan yang dimaksud. Tentang hal ini Iman Sudiyat SH menjelaskan kepada wartawan MP lebih kurang demikian : "Kebudayaan dari ragam suku-suku bangsa itu harus terus dilestarikan lewat proses kesinambungan. Generasi mendatang meneruskan apa yang sudah dicapai generasi sebelumnya. Kebudayaan dari ragam suku yang berbeda-beda itu terus dibina tanpa diskriminasi, sampai mencapai puncak prestasi. Lalu dari tiap-tiap puncak tadi diabstraksikan, sehingga lahir norma-norma umum yang bersifat nasional. Jadi kebudayaan nasional diciptakan dari bawah, melibat semua unsur kedaerahan".<sup>1 3</sup>

Untuk lebih memberikan gambaran nyata dari kehendak Ki Hadjar Dewantara, maka penulis menganggap perlu untuk melampirkan tulisan Ki Hadjar Dewantara yang menyangkut hal tersebut pada makalah ini. (lampiran)

#### **IV. KONSEPSI KI HADJAR DEWANTARA DAN UUD 1945 PASAL 32**

UUD 1945 pasal 32 sebenarnya isinya sangat sederhana, ialah : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun yang penting adalah penjelasannya, yang selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

"Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".<sup>14</sup>

Dari segi definisi tentang kebudayaan, rasanya rumusan penjelasan pasal 32 UUD 1945 tersebut sejiwa dengan definisi Ki Hadjar. Selanjutnya mengenai timbulnya dan pembinaan serta arah pengembangannya, bahkan seperti secara harafiah adalah hasil pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Hal demikian itu adalah wajar, karena Ki Hadjar Dewantara selain duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, juga menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan. Karena konsepsi Ki Hadjar itu menjiwai penjelasan pasal 32 tentang kebudayaan, yang sifatnya konstitusional, maka ketentuan tersebut akan menjadi pedoman seluruh rakyat dalam membina dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.

## **V. KI HADJAR DEWANTARA MENDIDIK SISWANYA SEUTUHNYA**

Ki Hadjar menilai, bahwa pendidikan yang berlaku berdasarkan kurikulum Pemerintah kolonial Hindia Belanda cenderung kepada usaha mengembangkan segi intelek, tanpa menghiraukan kepentingan nasional pemuda Indonesia. Pendidikan demikian dinilainya intelektualistis, dalam arti terlalu memuja-muja segi intelek secara berlebihan.

Ki Hadjar bukannya menilai bahwa seluruh pendidikan Barat selalu jelek. Ada pula segi-segi positifnya, di antaranya dalam mengembangkan kecerdasan. Adapun yang beliau tentang adalah intelektualismenya, bukan pengembangan inteleginya. Untuk memberikan keseimbangan terhadap pengembangan daya intelek itu Ki Hadjar sudah menambahkan dalam kurikulumnya : bahasa Indonesia, sejarah kebangsaan, budi pekerti, pendidikan kesenian, pendidikan ketrampilan dan pencak silat. Kelompok mata pelajaran itulah yang barangkali oleh Menteri Nugroho Notosusanto disebut sebagai humaniora. Anak didik dikembangkan raga dan jiwanya, meliputi segi cipta (kognitif), rasa (afektif) dan karsanya (psiko-motor). Segala

potensi kejiwaannya berkembang secara seimbang dan tidak berat sebelah. Di samping kecerdasan otak yang dikembangkan, kepada anak didik Tamansiswa ditanamkan jiwa kebangsaan, jiwa merdeka, sikap mandiri, semangat berjuang, cinta nusa dan bangsa serta semangat pengabdian dan kerelaan berkorban bagi kepentingan umum.

Hal demikian itu memang sesuai dengan sifat perguruannya, ialah sebagai Perguruan Kebangsaan yang bersifat nasional dan harus melaksanakan pendidikan nasional. Anak didik selain secara individual dibekali dengan ilmu, sikap dan ketrampilan, mereka juga dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik, yang bersedia membangun dan berjuang untuk kepentingan nusa, bangsa dan kemanusiaan.

Untuk mewujudkan pendidikan siswa seutuhnya itu, pelaksanaan pendidikannya dilandasi dasar Pancadharmā yang mengandung dasar-dasar : kodrat-alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan. Dasar kodrat-alam selain menempatkan manusia dengan hubungan vertikalnya dengan Tuhan Yang Maha Esa, juga menjalin hubungan horisontalnya dengan alam sekitar dan lingkungan hidup. Kodrat-alam sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan, merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan psikologi perkembangan dan pertumbuhan fisik anak didik. Oleh karena itu tumbuh-kembangnya jiwa-raga anak didik akan selalu sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum kodrat-alam.

Di samping itu kodrat-alam juga merupakan pedoman bagi pembinaan hidup kultural di perguruan, sesuai dengan lingkungan budaya di mana perguruan itu berada. Kemerdekaan merupakan karunia Tuhan kepada setiap makhluk ciptaanNya dan karenanya harus dijunjung tinggi. Kemerdekaan yang ada pada setiap anak didik inilah yang menjadi dasar berkembangnya kreativitas anak didik, yang harus terus menerus dipupuk dan dikembangkan. Hanya dengan cara demikianlah maka anak didik kita mempunyai kemungkinan untuk berkembang menjadi manusia yang berjiwa merdeka.

Berdasarkan kodrat-alam dan kemerdekaan itulah oleh Ki Hadjar Dewantara dibangun suatu sistem pendidikan, yang berjiwa kekeluargaan, dan kemudian dikenal sebagai Sistem Among atau Sistem Tutwuri handayani. Sesuai dengan kehadiran manusia sebagai makhluk individu yang sekaligus juga makhluk sosial, maka dalam Sistem Among, anak didik berkedudukan sebagai subyek dan obyek sekaligus dalam pendidikan.

Para pamong diwajibkan untuk memberikan kemerdekaan kepada setiap anak didiknya, sejauh mereka itu mampu memanfaatkannya secara baik. Tetapi kalau ternyata kemerdekaan itu bisa merugikan diri anak didik itu atau mengganggu kehidupan bersama, maka pamong harus mengambil langkah kebijaksanaan untuk meluruskannya (sikap handayani).

Konsepsi Ki Hadjar mengenai pendidikan ini perlu pula disoroti seperlunya, karena ini akan lebih menjelaskan latar belakang kegiatan perguruan Tamansiswa dan perjuangannya.

## **VI. KEBUDAYAAN DAERAH DAN KEBUDAYAAN NASIONAL**

Perkataan daerah bisa mengandung bermacam makna. Daerah bisa mempunyai arti geografis, bisa juga administrasi pemerintahan, tetapi bisa juga berarti etnik kesukuan. Dengan demikian kebudayaan daerah bisa berarti bermacam-macam pula. Dalam satu daerah (geografis atau administratif) belum tentu terdapat homogenitas kebudayaan. Ada kemungkinan terdapat lebih dari satu corak kebudayaan dalam daerah itu. Daerah Sumatra Utara misalnya terdiri dari 3 corak kebudayaan : Aceh, Melayu dan Batak.

Pengertian kebudayaan daerah yang biasa kita gunakan cenderung diartikan sebagai kebudayaan suku. Demikian pula bagi Tamansiswa, yang dimaksud dengan kebudayaan daerah adalah kebudayaan suku atau kebudayaan lingkungan, di mana perguruan Tamansiswa itu berada. Lingkungan budaya itu merupakan lingkungan sosial atau masyarakat yang memiliki tradisi kebahasaan sendiri sebagai bahasa daerahnya, adat istiadat, hukum adat dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan Kebudayaan Nasional adalah kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana kita ketemukan pada penjelasan pasal 32 UUD 1945.

## **VII. PERWUJUDAN KONSEPSI KI HADJAR DEWANTARA**

Setelah secara selintas kita menyoroti berbagai konsepsi Ki Hadjar di bidang kebudayaan dan pendidikan, maka akan kita ikuti bagaimana pelaksanaannya di berbagai perguruan Tamansiswa.

Seperti di muka telah dijelaskan, maka Ki Hadjar selaku pribadi memang benar-benar berasal dari lingkungan kraton Jawa (Pakualaman). Tetapi sesuai dengan perkembangan kepribadiannya, beliau adalah seorang nasionalis dalam pemikiran, penghayatan, perilaku dan perjuangannya.

Kebudayaan daerah dalam arti kebudayaan lingkungan di mana perguruan berada, memang selalu dipelihara dan dibina, dan diberikan kepada anak didiknya. Tamansiswa menyadari sepenuhnya, bahwa pembinaan kebudayaan daerah bukannya ditujukan untuk memupuk semangat kedaerahan (provinsialisme), tetapi tahu bahwa kebudayaan daerah itu akan merupakan unsur penunjang terwujudnya kebudayaan nasional di kemudian hari.

Secara substansial, maka kebudayaan daerah itu akan berupa : bahasa daerah, kesenian daerah, tradisi daerah, tatakrama daerah, legenda dan ceritera rakyat setempat dan sebagainya.

Dalam kelas terendah SD (kelas I sampai dengan III) sebagai bahasa pengantar pelajarannya adalah bahasa daerah atau bahasa Ibu. Dengan cara demikian maka karena mudahnya berkomunikasi, jalannya pendidikan akan lebih lancar. Penanaman pengertian baru bagi anak didik akan lebih mudah dimengerti. Pada saat itu anak dalam keadaan transisi antara kehidupan dalam keluarga dan memasuki masyarakat perguruan. Untuk kelas IV seterusnya sudah dapat digunakan bahasa pengantar bahasa persatuan, ialah bahasa Indonesia.

Pemberian bahasa dan sastra daerah sampai tingkat pendidikan menengah atas, dikaitkan dengan pentingnya peran bahasa tersebut dalam fungsinya akademik. Yang dimaksud ialah agar bagi mereka yang kemudian tertarik akan studi mengenai bidang bahasa dan sastra daerah tersebut, berkesempatan untuk mendapatkan apresiasi terlebih dahulu. Diakui bahwa berhubung dengan berbagai hal, pelaksanaannya dinilai masih kurang intensif.

Mengenai pendidikan kesenian disesuaikan dengan daerah masing-masing di mana perguruan Tamansiswa itu berada. Jadi kesenian apa yang bisa diberikan di Tamansiswa Yogyakarta akan berbeda dengan kesenian daerah di Tamansiswa Padang, Bandung, Medan, Palembang, Aceh dan sebagainya. Misalnya kalau di Yogyakarta diberikan seni tari gaya Yogyakarta, maka di Padang diberikan seni tari Minangkabau dengan berbagai jenisnya.

Di samping jenis kesenian daerah yang memang memiliki ciri-ciri yang khas, maka seni yang sudah berkedudukan nasional juga diberikan, seperti seni suara Indonesia, seni rupa, bahasa dan sastra Indonesia.

Tentang adat-istiadat sejak kelas-kelas terendah kita mulai dengan memperkenalkan dan selanjutnya juga memberi petunjuk bagaimana melaksanakan yang sebenarnya dan sebaik-baiknya. Mengetahui dan menguasai adat-istiadat daerah itu penting, agar supaya dengan menghayati nilai-nilai yang positif dapat pula dikembangkannya menjadi adat-istiadat nasional. Nilai budaya yang positif akan menjadi unsur pembentuk budaya nasional. Proses nasionalisasi itu akan berjangka waktu panjang.

Pendidikan budi pekerti secara substansial juga banyak diambilkan dari unsur budaya daerah seperti legenda, ceritera rakyat, dari seni wayang setempat atau adat-istiadat daerah. Budi pekerti diharapkan akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak didik. Selain dari bahan-bahan tersebut pelajaran budi pekerti juga dapat diisi dengan bahan yang bersumber dari hidup keagamaan, seperti ceritera nabi dan sebagainya.

Permainan kanak-kanak yang diiringi dengan nyanyian daerah juga diberikan untuk anak-anak tingkat SD. Selain permainan tradisional, kemudian juga diciptakan hal-hal yang baru, baik tema, ceritera maupun nyanyiannya. Isi ceriteranya selalu diambilkan yang mengandung nilai edukatif. Dalam perkembangannya melalui permainan kanak-kanak tersebut dapat pula digubah menjadi suatu drama tari kanak-kanak, sejenis operette dengan nyanyian dan bahasa daerah.

## VIII. PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Tentang pendidikan Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan sebagai berikut :

“Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa-raga anak-anak, agar dalam garis kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungan yang mengelilinginya, mereka mendapat kemajuan dalam hidupnya lahir-batin menuju ke arah adab kemanusiaan”.<sup>15</sup>

Jelas kiranya bahwa dalam merumuskan sistem pendidikannya ternyata bernafaskan kultural pula. Keberhasilan pendidikan selain ditentukan oleh faktor-faktor kodrati juga oleh faktor lingkungan. Di sinilah antara lain akan sangat berpengaruh kebudayaan lingkungan atau kebudayaan daerah.

Dalam hubungannya dengan pembinaan kebudayaan, pendidikan mempunyai dua sifat, ialah reflektif dan progresif. Yang dimaksud dengan reflektif ialah tugas untuk menyampaikan nilai budaya, sebagaimana halnya diwujudkan di kalangan perguruan Tamansiswa melalui berbagai cara. Sedang dengan progresif maksudnya ialah tugas untuk mengembangkan kebudayaan itu ke taraf yang lebih baik.<sup>16</sup>

Karena nilai-nilai budaya daerah harus disajikan melalui pendidikan, maka secara materiil hal-hal tersebut harus dipersiapkan secara baik. Oleh karena itu harus selalu ada usaha untuk melestarikannya. Hal ini pada dasarnya meliputi dua hal, ialah yang sifatnya idiil-kultural dan yang sifatnya teknis. Untuk ini di Tamansiswa diselenggarakan semacam sarasehan guna membicarakan hal-hal yang idiil, dan adanya Taman Kesenian untuk mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya teknis. Di pusatnya ialah Majelis luhur Tamansiswa Yogyakarta, secara regular selalu diadakan seminar kecil di antara para anggotanya. Taman Kesenian diadakan di pusat-pusat kebudayaan di mana terdapat perguruan Tamansiswa, seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Padang, Medan, Palembang dan sebagainya.

Perlu kiranya ditegaskan di sini lagi, bahwa pemeliharaan dan pembinaan kebudayaan daerah bukannya untuk memupuk provinsi-alisme, melainkan memetri nilai budaya yang luhur. Sesuai dengan prinsip pembinaan kebudayaan, bahwa hendaknya kita bersikap selektif-adaptatif, maka dalam membina kebudayaan daerah pun kita juga harus bersikap demikian. Artinya jika ada nilai budaya yang sekiranya sudah tidak relevan dengan peri kehidupan kita dewasa ini, maka nilai budaya itu harus ditinggalkan. Tetapi nilai-nilai yang masih relevan dan bermanfaat bagi hidup kita lahir-batin harus tetap kita lestarikan.

Pada umumnya nilai budaya daerah yang mempunyai relevansi yang tinggi dan tahan lama, akan bisa diangkat menjadi nilai budaya nasional. Dengan demikian maka pembinaan kebudayaan daerah

sekaligus juga telah turut serta membina perkembangan kebudayaan nasional. Yang dapat kita masukkan ke dalam kebudayaan nasional biasanya adalah abstraksinya atau hakekatnya, sedang isi, bentuk dan iramanya dapat diselaraskan dengan tuntutan perkembangan kebudayaan itu sendiri.

## IX. SUMBANGAN TAMANSISWA UNTUK KEBUDAYAAN NASIONAL

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pluralistik dalam banyak hal. Sehubungan dengan hal tersebut adalah sangat bijaksana para pendiri Republik Indonesia ini menggunakan lambang negara Bhineka Tunggal Ika. Dalam membina kebudayaan nasional kita, hendaknya jiwa yang terdapat dalam lambang itu hendaknya selalu kita perhatikan. Ada nilai budaya yang memang bisa manunggal bentuknya, tetapi ada pula yang tidak perlu berbentuk tunggal.

Seperti bahasa persatuan merupakan salah satu wujud unsur budaya kita yang wujudnya tunggal. Sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem hankam, kesemuanya ini merupakan unsur budaya kita yang harus tunggal wujudnya. Tetapi jika kita berbicara tentang seni tari sebagai unsur budaya nasional kita, kiranya wujudnya bisa beraneka warna, namun mempunyai arti hakekat yang sama. Demikian pula dengan berbagai ragam bentuk kesenian lainnya.

Kebhinekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia menunjukkan akan banyaknya unsur kebudayaan kita yang beragam-ragam, namun kesemuanya terikat indah dalam ketunggalan cita-cita.

Sesuai pula dengan cara pembinaan kebudayaan nasional seperti tersurat dalam pasal 32 UUD 1945, maka Tamansiswa menyadari sepenuhnya, bahwa dalam perkembangannya kebudayaan daerah akan dapat menunjang terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka hasil penggalian dan pemikiran yang oleh Tamansiswa telah diolah menjadi berbagai konsepsi, yang semula bersumber dari unsur kebudayaan daerah, dipertimbangkan untuk diperjuangkan agar bisa menjadi unsur kebudayaan nasional Indonesia.

Adapun wujud dari hasil pemikiran tersebut ada yang merupakan konsepsi di berbagai bidang kemasyarakatan, dan ada pula sendi

hidup yang oleh Tamansiswa diyakini kemanfaatannya bagi pembinaan suatu negara-bangsa.

Nilai-nilai yang akan diperjuangkan itu antara lain :

- (a) kesederhanaan;
- (b) kejujuran;
- (c) kekeluargaan;
- (d) jiwa merdeka;
- (e) jiwa kebangsaan;
- (f) tutwuri handayani;
- (g) sikap-laku among;
- (h) sistem pendidikan among;
- (i) trilogi kepemimpinan :   ing ngarso sung tulodo  
  ing madyo mangun karso  
  tutwuri handayani;
- (j) pendidikan demokratis;
- (k) tri-pusat pendidikan;
- (l) trikon teori;
- (m) masyarakat tertib-damai.

*Kesederhanaan* adalah suatu nilai hidup yang berkaitan dengan asas kemerdekaan dan sikap kemandirian. Supaya tidak terjadi ketergantungan dan akan selalu bebas-merdeka serta kemampuan mandiri, maka kita wajib melaksanakan hidup sederhana.

Maksudnya ialah agar supaya kita selalu berusaha namun tidak harus "ngoyo". Sendi hidup sederhana itu diharapkan berlaku bagi manusia secara individual maupun masyarakat dan juga negara sekalipun. Kesederhanaan inilah yang merupakan salah satu modal perjuangan Tamansiswa.

*Kejujuran* melekat kepada sifat kepemimpinan yang dituntut untuk menjadi teladan dan memberikan keteladanan bagi para pengikutnya. Dalam mengelola suatu lembaga/instansi maka unsur kejujuran ini akan sangat menentukan keberhasilannya. Kejujuran itu dipersyaratkan bagi setiap manusianya, tetapi dampaknya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam memperjuangkan hal tersebut, sebenarnya sudah sampai pula ke Bapak Kepala negara, dan sudah selalu diimbau dan dianjurkan, namun perwujudannya dalam masyarakat secara luas masih belum memadai.

Sendi hidup *kekeluargaan* merupakan salah satu sendi hidup di kalangan Tamansiswa yang kemudian juga merupakan salah satu

ciri khasnya. Organisasi Tamansiswa pun dikelola menurut sendi kekeluargaan ini.

Prinsip kekeluargaan ini secara konstitusional juga sudah tercantum di dalamnya, ialah pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam ceramahnya di Pendapa Tamansiswa, Bung Hatta telah mengukuhkan, bahwa istilah kekeluargaan dalam pasal 33 tersebut dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Tentang *jiwa merdeka* berhubungan dengan tujuan pendidikan Tamansiswa, yang ingin menjadikan anak didiknya sebagai manusia yang berjiwa merdeka. Dari jiwa merdeka inilah sebenarnya yang dapat kemudian dikembangkan menjadi berbagai sikap positif seperti : sikap demokratis, toleransi, musyawarah, kebersamaan, kekeluargaan, swa-disiplin, kebersamaan dan tanggungjawab.

*Jiwa kebangsaan* oleh Tamansiswa dianggap landasan perjuangan yang sangat fundamental. Sejak kelahirannya Tamansiswa sudah mengibarkan bendera kebangsaan ini, karena membina suatu bangsa harus dilandasi kesadaran kebangsaan ini. Tanpa semangat kebangsaan maka kehadiran suatu bangsa serta upaya pelestariannya akan menghadapi banyak rintangan dan hambatan. Meskipun kita sudah merdeka sebagai bangsa dan telah memiliki negara Indonesia yang merdeka, tetapi jiwa kebangsaan masih tetap kita perlukan.

*Tutwuri handayani* adalah semboyan dari pelaksanaan pendidikan Tamansiswa, yang jiwanya kekeluargaan dan berlaku secara demokratis. Sistem ini juga disebut sistem Among, yang menempatkan anak didik sebagai subyek dan obyek sekaligus dalam proses pendidikan. Semboyan tersebut kini sudah menjadi semboyan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melengkapi lambang departemen tersebut yang berintikan lukisan garuda dan blencong. (Bandingkan dengan lambang Tamansiswa).

*Sikap-laku among* yang semula merupakan tuntutan bagi para pamong Tamansiswa dalam melaksanakan tugasnya, ternyata dewasa ini dapat pula dilaksanakan dalam masyarakat dalam komunikasi antar manusia. Sikap-laku yang semula digunakan dalam dunia pendidikan, ternyata bisa diangkat untuk dijadikan suatu pranata sosial. Jika dalam pergaulan hidup tiap individu bersikap-laku among, artinya saling "nguwongake" (memperlakukan wawan-lakunya sesuai

dengan martabat kemanusiaannya), maka dalam masyarakat akan terjadi suasana yang tertib-damai, terdapat keselarasan dan menciptakan perasaan aman dan bahagia.

*Sistem pendidikan among* pada dasarnya dengan cara sepotong-sepotong telah pula mempengaruhi pendidikan nasional kita. Suatu sistem yang meletakkan sebagai pokok aktivitas anak didik, adalah sesuai dengan sistem pendidikan among. Lebih-lebih setelah "tutwuri handayani" dijadikan semboyan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan hal tersebut diharapkan jiwa among akan menjiwai setiap guru Indonesia dalam melaksanakan tugas pendidikannya.

Mengenai *Trilogi Kepemimpinan* semula merupakan asas kepemimpinan. Bagi seorang pamong yang dalam proses pendidikan berkedudukan sebagai "pemimpin", maka mereka itu wajib mentrapkan trilogi kepemimpinan itu sesuai dengan tingkat pendidikan yang dihadapi.

Dewasa ini ternyata bahwa trilogi tersebut sudah masuk pula dalam Azas Sebelas kepemimpinan ABRI, yang tercantum dalam kitab Darma Pusaka, yang menjadi pedoman utamanya ABRI kita. Di samping itu dalam Penataran P-4, maka Kepemimpinan Pancasila juga digunakan trilogi kepemimpinan itu.

Dalam salah satu Rapat Pimpinan ABRI (waktu itu istilahnya Commanders Call ABRI), Bapak Presiden Suharto pernah mengamanatkan sebagai berikut : "Kalau bangsa kita hendak menciptakan masyarakat yang maju, yang modern yang terbuka dan berorientasi kepada prestasi, maka kepemimpinan yang kita perlukan adalah kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, ialah : ing ngarso sung tulodo, ing madyo manguk karso, dan tutwuri handayani".

Kalau kita ingin menjangkau agar seluruh rakyat bisa menerima pendidikan, maka yang harus kita laksanakan adalah *pendidikan yang demokratis*. Ini mengandung arti bahwa pendidikan hendaknya merata dan dapat menjangkau seluruh anak rakyat. Ki Hadjar selalu berpendapat, bahwa horisontalisasi pendidikan harus lebih diutamakan dari pada vertikalisasi pendidikan, kalau yang terakhir ini menghambat pemerataan pendidikan.

Dewasa ini ternyata bahwa usaha pemerataan ini telah diwujudkan melalui pelaksanaan Wajib Belajar di tingkat SD dan pembukaan

Universitas Terbuka (pemerataan di tingkat pendidikan tinggi).

Tentang konsepsi pendidikan *Tripusat Pendidikan*, hal demikian merupakan hal yang mutlak penting kalau kita menghendaki keberhasilan di bidang pendidikan. Prinsip ini sudah masuk ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sejak GBHN 1973. Ini berarti bahwa secara nasional prinsip tersebut sudah diakui kebenarannya. Hanya pelaksanaan operasionalnya masih perlu berbagai penertiban.

*Teori Trikon* sebagai upaya guna membina kebudayaan nasional sebagaimana telah dengan agak luas diuraikan di muka, kiranya sudah tertampung dalam pasal 32 dan penjelasannya. Dalam praktek juga menunjukkan bahwa asas Trikon itulah yang mempedomani kita untuk membina kebudayaan dalam masyarakat.

Adapun yang terakhir adalah upaya mewujudkan masyarakat Tertib-damai, yang menjadi tujuan akhir perjuangan Tamansiswa. Sasaran ini dengan bahasa yang lebih aktual, kiranya sama pula dengan masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila. Lain rumusan dan unguapannya, namun hakekat isinya adalah sama.

## X. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Uraian ini perlu kiranya diakhiri dengan pernyataan, bahwa Tamansiswa sebagai wadah perwujudan berbagai konsepsi Ki Hadjar Dewantara, secara khusus di bidang kebudayaan, terlibat langsung dalam proses perjuangan ke arah terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia.

Dari seluruh uraian itu perlu disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan kebudayaan daerah tidak perlu dipertentangkan dengan pembinaan kebudayaan nasional, karena nilai-nilai budaya daerah secara selektif dapat menunjang usaha pembentukan kebudayaan nasional.
- (2) Konsepsi pembinaan kebudayaan Ki Hadjar Dewantara dapat digunakan untuk membina kebudayaan daerah maupun untuk membina kebudayaan nasional.
- (3) Teori Trikon dapat digunakan untuk membina kebudayaan nasional dalam pertemuan silangnya dengan kebudayaan asing,

dengan tetap berpegang kepada identitas nasional dan kepribadian bangsa.

- (4) Terjadinya kebudayaan Indonesia, yang menggunakan kebudayaan daerah sebagai modal dasarnya, akan ditentukan oleh waktu dan proses serta perkembangan faktor-faktor yang sifatnya integratif.
- (5) Dalam kedudukannya sebagai suatu perguruan, yang hakekatnya juga merupakan lembaga perjuangan kebudayaan. Tamansiswa melaksanakan pendidikan yang sifatnya reflektif dan progresif, sehingga secara langsung terlibat dalam proses pengembangan kebudayaan nasional.
- (6) Dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan hendaknya kita bersikap selektif dan adaptatif, agar nilai budaya yang diserap (atau dilestarikan) akan diterima sebagai unsur pembaharu secara laras dan dapat meningkatkan kualitas kebudayaan nasional yang sedang dikembangkan.
- (7) Akhirnya ingin diperjelas, bahwa Tamansiswa bukanlah berorientasi kedaerahan, melainkan berhaluan nasional baik dalam pemikiran, penghayatan, berperilaku maupun perjuangannya.

**CATATAN REFERENSI**

1. Sayoga, Ki; Riwayat Perjuangan Tamansiswa, dalam Kitab 30 tahun Tamansiswa, 1981, hl. 204–205.
2. Dewantara, Ki Hadjar; Tigapuluh tahun berjuang dan membangun dalam Kitab 30 tahun Tamansiswa, hl. 16.
3. Sardjito, Prof. Dr; Pidato Promotor dalam Masalah Kebudayaan, hl. 14.
4. Koentjaraningrat; Pengantar Antropologi, hl. 79.
5. Koentjaraningrat; Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, hl. 11.
6. Gazalba, Sidi Drs.; Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu, hl. 43.
7. Dewantara, Ki Hadjar; Pidato Promosi dalam Masalah Kebudayaan, hl. 31.
8. idem .
9. Koentjaraningrat; Pengantar Antropologi, hl. 81.
10. Dewantara, Ki Hadjar; Pidato Promosi dalam Masalah Kebudayaan, hl. 81.
11. Koentjaraningrat; Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, hl. 15.
12. Dewantara, Ki Hadjar; Pidato Promosi dalam Masalah Kebudayaan, hl. 32–33.
13. Sudiyat, Iman SH; dalam Minggu Pagi 30 Desember 1985.
14. Gazalba, Sidi Drs.; Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu, hl. 97.
15. Tamansiswa, Peraturan Besar 1980.
16. Saifullah, Ali Drs.; Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, hl. 17.

## KEPUSTAKAAN

1. Dewantara, Ki Hadjar ; Karya jilid I.
2. idem ; Karya jilid IIA.
3. idem ; Pidato Promosi dalam Masalah Kebudayaan.
4. Gazalba, Sidi Drs; Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu.
5. Koentjaraningrat ; Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan.
6. idem ; Pengantar Antropologi.
7. Minggu Pagi tanggal 30 Desember 1985.
8. Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa 1980.
9. Saifullah, Ali Drs.; Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
10. Sayoga, Ki; Riwayat Perjuangan Tamansiswa dalam 30 Tahun Tamansiswa.
11. Sardjito, Prof. Dr; Pidato Promosi dalam Masalah Kebudayaan.
12. Tamansiswa 30 Tahun.
13. Tamansiswa 60 Tahun.

**LAMPIRAN :** (kutipan dari Ki Hadjar Dewantara : Pendidikan dan Kebudayaan).

## **TENTANG PUNCAK-PUNCAK DAN SARI-SARI KEBUDAYAAN DI INDONESIA**

Oleh : Ki Hadjar Dewantara

Segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang terdapat di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang baru yang berjiwa nasional, itulah kebudayaan nasional.

Demikianlah definisi yang telah disahkan dalam salah satu kongres Tamansiswa, sesudah soalnya diperbincangkan dengan saksama. Karena pendirian ini kadang-kadang menimbulkan reaksi di kalangan tertentu, lebih-lebih karena reaksi tadi umumnya berdasarkan salah penerimaan atas arti dan maksud definisi tersebut (dan ini rupa-rupanya disebabkan karena kurang telitinya orang membaca atau menyelaami fikiran secara "deductief"), maka di bawah ini kita berikan sekedar penjelasan tentang pendirian kita itu.

Salah pengertian tadi misalnya terbukti dalam kritik-kritik yang antara lain mengandung sangkaan, bahwa puncak-puncak dan sari-sari tadi merupakan "kumpulan" atau dikumpulkan menjadi satu, lalu dipakai orang seluruh Indonesia. Di antaranya ada yang mengira, bahwa pakaian nasional Indonesia itu menurut teori "puncak-puncak" tadi misalnya mungkin akan berupa : "ikat kepala blangkon, baju Minangkabau, sarung setengah dilipat, celana hitam memanjang dan sepatu setengah sandal".

Atau kalau mengenai bangunan rumah : ruang muka berbentuk pendopo, tengah campuran Batak, Minangkabau, Kalimantan, dan belakang berupa puri Bali. Sangkaan-sangkaan itu adalah "prasangka" belaka. Atau deduksi yang salah.

Seperti sudah berulang-ulang saya terangkan: puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan, yang terdapat di seluruh kepulauan kita itu, adalah merupakan *modal kita pertama*, yang nantinya harus dan akan disusul dengan *ciptaan-ciptaan baru*, yang timbul karena ada hasrat *untuk membangun kebudayaan sendiri* dan karenanya pasti akan *berjiwa nasional*.

"Modal pertama" tadi sebenarnya hanya berarti pengakuan, bahwa

segala apa yang luhur dan indah di seluruh Indonesia itu adalah kekayaan rakyat kita se-Indonesia. Kebudayaan rakyat Aceh, keteguhan dan keberanian pahlawan-pahlawannya bukan lagi rakyat Aceh saja yang memiliki, namun kita rakyat seluruh Indonesia turut mempunyainya dan ikut berbangga. Begitu pula segala kekayaan batin rakyat Minangkabau, segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sunda Kecil, Maluku dan sebagainya, kita seluruh rakyat Indonesia turut memilikinya. Apabila konsepsi ini ditolak maka itu berarti, bahwa pada saat ini *bangsa Indonesia* sungguhpun sudah ada, namun berupa suatu bangsa yang *tidak berkebudayaan*.

Sebaliknya kalau teori puncak-puncak dan sari-sari tadi dibenarkan maka itu berarti, bahwa pada waktu ini, pada saat Indonesia menjadi satu negara yang merdeka, rakyatnya pada saat itu sudah kaya kebudayaan.

Dalam pada itu *janganlah dikira*, bahwa kesenian-kesenian yang luhur dan indah, yang terdapat di Sulawesi, di Sumatra, di Jawa, di Bali dan lain-lain harus dijadikan kesenian yang harus dipelihara dan dipelajari oleh rakyat di daerah-daerah yang bukan daerahnya sendiri.

Dalam soal bahasa, kesenian, adat-istiadat dan lain-lain yang bertali dengan kedaerahan, janganlah hendaknya orang mengejar kesamaan. Jangan sampai kita berusaha menyatukan apa yang *tidak dapat* dan *tidak perlu* disatukan. Cukuplah jika kita hanya *menyatukan pokok-pokok* dan *dasar-dasarnya saja*, artinya yang memang dapat dipersatukan. Hal ini perlu diingati karena di zaman *politik* kita sekarang ini kerap kali orang menuntut kesatuan yang tidak perlu atau tidak mungkin. Tuntutan kesatuan seperti yang tersebut itu kerap kali bahkan menjadi salah satu sebab akan timbulnya *perpecahan*.

Lain halnya kalau orang dapat melakukan *pilihan secara bebas dan sukarela*. Misalnya seperti yang sudah seringkali saya contohkan: banyak orang laki-laki di Jawa membuang kain batiknya dan ikat kepalanya, lalu memakai songkok Sumatra dan celana modern: wanita-wanita Sulawesi, Kalimantan, Sumatra dan lain-lain banyak yang gemar pada kain batik Solo atau Yogya. Kita di zaman sekarang dapat memilih, karena batas-batas pulau kita dan batas-batas hidup kita di seluruh Indonesia kini makin lama makin menjadi suram-

suram atau berkurang, sedikitnya kita merasa sudah lenyapnya dan hapusnya politik memecah belah seperti di zaman kolonial. Dengan kapal terbang dapatlah kita dalam sementara jam saja mengunjungi daerah-daerah yang jauh-jauh, hal mana dulu memakan waktu beberapa hari.

Berkat adanya siaran radio saban hari kita dapat mengikuti segala kejadian di seluruh kepulauan kita. Adanya satu Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (kini Depdikbud, R) dapatlah kita bersama-sama menempuh kemajuan ke arah satu hidup dan penghidupan. Dalam perjalanan kita ke arah kesatuan itu janganlah dilupakan pengaruh yang besar yang kita dapat dari kegiatan Pers kita. Berkat adanya tradisi pameran atau "exposisi" dapatlah kita menyaksikan sendiri pelbagai kemajuan dalam segala lingkungan hidup, kesehatan, kerajinan, ekonomi, kesenian dan lain-lain cabang kebudayaan di seluruh Indonesia.

Tentang pengaruh yang dengan sendiri meluas karena adanya alat-alat perhubungan yang modern itu, dapatlah kita saksikan sendiri antara lain semakin berkurangnya perbedaan antara bahasa-bahasa dialek, lagu-lagu dan gending-gending serta tarian-tarian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sebagainya. Makin lama makin banyak orang pencipta lagu-lagu musik modern yang menggunakan nada gamelan "slendro" maupun "pelog". Di samping itu ada lagu-lagu ciptaan sekarang, yang memasukkan nada-nada baru, yakni *nada tengahan* secara musik Barat, dan "wirama cepat" bahkan "wirama tiga-perempat" (wals) yang nyata-nyata terjadi karena pengaruh Barat. Rakyat mulai dapat menghargai sistem "sandiwara" modern, sekalipun belum suka melepaskan perhatiannya terhadap wayang dan ketoprak, yang hingga kini tetap digemarinya. Lambat-laun nampak jelas *laku ke arah kesatuan*, yang "*natuurlijk*", yakni menurut kodratnya keadaan; tidak dengan paksaan, tanpa "diktator-diktatoran" karena bentuk dan isi baru tadi memang menyenangkan dan menarik rakyat. Dengan begitu maka dari segala apa yang diterima rakyat, *di seluruh kepulauan* itu, nantinya ada yang akan merupakan *kesenian nasional yang umum*, sekalipun tadinya hanya terdapat sebagai "puncak-puncak" di berbagai daerah, di kota besar seperti Jakarta dan sebagainya sebagai "ciptaan baru". Mungkin masih ada golongan yang tidak menyukai kesenian baru yang berkembang menjadi kesenian umum itu, ini sudah selayaknya, namun kemauan rakyat-

lah yang akan menentukan, sekalipun ada golongan-golongan yang merasa sayang dan berkecewa hati tadi. *Laku ke arah kesatuan* tidak berarti, bahwa kelakinya segala *bentuk kebudayaan daerah* akan lenyap karena harus diganti atau akan diganti dengan *bentuk kesatuan nasional*. Banyak kiranya bentuk-bentuk kedaerahan tadi yang tidak mungkin atau tidak perlu dipersatukan. Dan akan terus hidup karena terus dipelihara oleh rakyat daerahnya masing-masing. Kewajiban kita ialah menjaga, jangan sampai *kepentingan daerah* tadi menghalang-halangi tumbuhnya kesatuan umum yang lebih penting, yaitu kesatuan kebangsaan.

\* \* \* \* \*

Ada lagi soal yang kita harus berani melihatnya, yaitu masuknya unsur-unsur atau anasir-anasir dari luar, dari *alam asing* umumnya, *alam Barat* khususnya. Juga ini tidak mengapa dan sudah semestinya pula. Dimana kita tidak kurang dari tiga setengah abad hidup berdekatan dengan bangsa-bangsa Barat, baik yang *menjajah* maupun yang *berdagang*, lebih-lebih yang di tanah air kita *menyebarkan ideologinya*, agamanya ataupun falsafahnya, sudah barang tentu selama waktu yang panjang itu kita telah kemasukan pengaruh-pengaruhnya; ada yang baik dan ada pula yang buruk dan jahat. Dalam keadaan yang begitu wajiblah kita selalu *memilih*, yaitu memilih segala apa yang dapat *memperkembang* dan/atau *memperkaya* hidup kita. *Kebudayaan* adalah *kemurahan Tuhan* terhadap manusia untuk *kemajuan hidupnya* dan karenanya *tidak boleh ditolak* begitu saja dari manapun asalnya.

Dalam hal ini hendaknya jangan dilupakan pula, bahwa dasar *kebangsaan* tidak lain dari pada *perkhurusan* dari pada sifat *kemanusiaan*. "Khusus" karena disesuaikan dengan alam dan zamannya sendiri.

Hal ini perlu dikemukakan, karena dalam zaman sekarang perkataan "kebangsaan" atau "nasional" itu biasa terpakai dalam arti kenegaraan, sebagai pengertian politik semata-mata.

\* \* \* \* \*

Patut pula selalu diingati, bahwa tidak mungkin sesuatu kebudayaan dapat berkembang ke arah kemajuan, apabila kebudayaan tadi

*mengasingkan diri*. Janganlah dilupakan, bahwa *isolasi* itu menyebabkan *kebekuan* atau "verstarring", juga *kemunduran* atau "dekadensi" bahkan menyebabkan *matinya* kebudayaan dalam hidupnya suatu bangsa. Pergaulan dengan kebudayaan-kebudayaan asing itulah jalannya ke arah kemajuan kebudayaan. Hendaklah jalan itu ditempuh dengan melalui petunjuk-petunjuk "tri-kon", yaitu *kontinu* dengan alam kita sendiri, *konvergen* dengan alam luar dan akhirnya bersatu dengan alam universal, dalam persatuan yang *konsentris* (bersatu namun tetap mempunyai *kepribadian sendiri*).

Patut pula di sini dikemukakan, bahwa caranya menempuh kemajuan kebudayaan itu bukannya asal meniru belaka, dalam arti "menjiplak", mengkopi atau "ngeblak-pola", melainkan haruslah *memasaknya* (yakni mengolah) segala bahan dari dunia asing itu, untuk kita jadikan *masakan baru*, yang *lezat rasanya* dan *menyehatkan diri kita*. Sering saya gambarkan: *nasi goreng modern* tetap *nasi goreng nasional*, meskipun kita menggunakan *mentega* dan *sisiran kiju* yang berasal dari Nederland. Mungkin nanti pada permulaan ada yang menamakan makanan baru itu *tidak asli*, akan tetapi kalau rakyat sudah mengakuinya sebagai makanan yang *umum*, maka dengan sendirinya masakan baru tadi menjadi *masakan nasional yang asli*. Di sini ingatlah saya kepada ucapan Rabindranath Tagore. Setelah menyaksikan sendiri pertunjukan wayang orang "Mondro Wanoro" di Kapatihan Yogyakarta (1927) maka berkatalah beliau: "Kamu orang Jawa mengambil Ramayana dan Mahabarata dari kebudayaan Hindu, akan tetapi kamu dapat mewujudkannya sebagai drama, yang bangsa kami sendiri tidak sanggup melaksanakannya". Waktu Prof. Dr. Chatterjee seorang pengikutnya menambahkan, bahwa khususnya figur Hanuman lebih tepat digambarkan di dalam wayang orang sebagai "kera" yang bersifat "pendeta" yang dihormati, dari pada di dalam drama India di mana Hanuman tersebut diwujudkan sebagai "nar", yakni "badut" atau dengan peran "dagelan".

Ada lagi satu dasar fikiran yang salah yang kadang-kadang dikemukakan orang, yaitu bahwa puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan di Indonesia tadi hanya terdapat di Jawa, sehingga teori puncak-puncak itu berarti men-Jawakan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Setelah membaca keterangan yang termaksud di atas tadi jelaslah kiranya bagi kita, bahwa pendapat tentang "cultuur imperialisme"

Jawa itu adalah tidak benar dan mungkin hanya dapat timbul dalam jiwa yang mengandung "inferieuriteits-complexen".

Rupanya banyak saudara-saudara dari daerah-daerah di luar Jawa tidak menginsafi atau belum menginsafi akan adanya puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di daerah-daerah tersebut, baik yang masih *nampak* hidup terus, maupun yang *tersimpan* di dalam adat-istiadat atau sejarahnya masing-masing. Kebudayaan yang berjenis-jenis dan terdapat di seluruh kepulauan itu semuanya mempunyai lingkungan sendiri-sendiri dan sekali-sekali tidak boleh ditonjol-tonjolkan, lebih-lebih didesakkan secara paksaan diktatorial kepada rakyat di daerah-daerah yang bukan daerahnya sendiri. Kalau masih ada orang yang ingin "men-Jawakan" rakyat-rakyat di luar pulau Jawa, maka pastilah orang tadi adalah orang yang asing dalam alam dan zaman kita, yang serba demokratis sekarang ini.

(Dikutip dari Pusara nomor 3 Juni 1953).

\* \* \*

## PARA PENULIS

Anak Agung Gde Putra Agung lahir di istana Agung Amlapura (Karangasem) Bali pada tahun 1937. Selesai menamatkan pendidikan Sekolah Dasarnya di Bali, Putra Agung mulai hijrah ke Yogyakarta sampai menyelesaikan keserjanaannya dalam ilmu sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1974. Dan pada tahun 1983 ia meraih gelar Sarjana Utama ilmu sejarah dari Fakultas Pasca Sarjana UGM. Pengalaman sebagai pendidik dimulai sejak 1964, ketika Putra Agung diangkat sebagai asisten di Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar, sampai menjadi dosen tetap sampai sekarang. Jabatan-jabatan yang pernah dipikunya ialah Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unud (1964 – 1971), Pembantu Dekan III (1975 – 1981), dan Ketua Jurusan Sejarah (1983 – sampai sekarang). Selain banyak menulis artikel di beberapa majalah, Putra Agung giat pula mengadakan penelitian baik yang disponsori oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, maupun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

Edi S. Ekadjati lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tahun 1945. Setelah pada tahun 1971 menyelesaikan studi ilmu sejarahnya di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, ia memperdalam penelitian bidang filologi dan sejarah di Rijk's Universiteit di Leiden (1974 – 1975). Tahun 1979 Ekadjati berhasil menggondol gelar Doktor dalam bidang Filologi di Universitas Indonesia. Sejak 1969 sampai sekarang ia mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Universitas Padjadjaran. Beberapa jabatan di Universitasnya pernah dipangkunya, yaitu sekretaris Jurusan Sejarah (1973 – 1974), Sekretaris Lembaga Kebudayaan (1978 – 1980), Pembantu Direktur Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (1980 – 1983), dan Ketua Jurusan Sejarah (1982 sampai sekarang). Di samping itu Ekadjati juga menjabat sebagai Kepala Museum Asia Afrika (1980 sampai sekarang), dan Pimpinan Proyek Sundanologi (1984 sampai sekarang). Karya tulisnya cukup banyak, antara lain : *Penyebaran Agama Islam di Pulau Sumatera* (1975), *Fatahillah Pahlawan Arif Bijaksana* (1975), *Sejarah*

*Limbangan Bandung I dan II (1978/1979), Babad Cirebon (1978), dan Cerita Dipati Ukur (1982).*

Djoko Soerjo yang dilahirkan pada 1939, menyelesaikan pendidikannya dalam ilmu sejarah di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970. Adapun gelar Doktornya ia peroleh dari Monash University Australia tahun 1983. Kariernya sebagai pendidik dititinya sejak Djoko Soerjo menjadi guru sekolah dasar di Yogyakarta sampai menjadi dosen tetap pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Ia aktif pula mengikuti seminar-seminar nasional dan internasional. Di samping kesibukannya sebagai dosen sejarah dan Ketua Jurusan Sejarah di UGM, Djoko Soerjo sibuk pula mengerjakan penelitian dan penulisan, antara lain, ia adalah salah seorang anggota penulis buku standard *Sejarah Nasional* (6 jilid), anggota penulis buku teks sejarah untuk SMP dan SMA, dan Koordinator penulisan sejarah lokal. Penelitiannya bukan hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga sampai ke negeri Belanda, Inggris dan Australia.

Dilahirkan di Bandung pada tahun 1923, Ki Soeratman meniti kariernya sebagai tokoh Tamansiswa di Yogyakarta. Setamat dari Taman Guru Tamansiswa pada tahun 1943, Ki Soeratman mulai terjun sebagai pendidik. Dan sejak tahun 1950 menjadi anggota Majelisluhur Tamansiswa. Dari tahun 1975 Ki Soeratman mulai dipercaya duduk sebagai Ketua Umum Majelisluhur Tamansiswa. Jabatan ini dipangkunya sampai sekarang di samping memberi kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Di bidang pendidikan kesenian Ki Soeratman juga sangat aktif. Di samping sebagai guru pada Konservatori Tari Indonesia Yogyakarta, ia adalah salah seorang pendiri Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta (sekarang Fakultas Kesenian Institut Seni Indonesia Yogyakarta). Aktivitas tokoh kuat Tamansiswa ini juga dicurahkan pada kepramukaan. Sejak jaman Kolonial ia sudah menjadi anggota Kepanduan Bangsa Indonesia. Dan sejak tahun 1979 sampai sekarang Ki Soeratman adalah anggota Majelis Pembina Nasional Gerakan Pramuka. Berbagai seminar pendidikan dan kebudayaan, baik yang lokal, nasional maupun internasional diikutinya. Sejak tahun 1972 – 1980 Ki Soeratman menjabat sebagai wakil Ketua Komisi IX DPR–RI, dan sampai sekarang masih tetap menjadi anggota Komisi yang sama.

Perpustakaan  
Jenderal

30  
S